

TOKOH POLITIK SULAWESI SELATAN DI PENTAS NASIONAL

1955-1959



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

OLEH:

Manda Alifa Mahira Hermawan

F061191020

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

SKRIPSI
TOKOH POLITIK SULAWESI SELATAN DI PENTAS NASIONAL
1955-1959

Disusun dan diajukan oleh:

MANDA ALIFA MAHIRA HERMAWAN

F061191020

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 19 Mei 2023 dan dinyatakan telah memenuhi sejumlah persyaratan.



Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.Si
NIP. 196412171998031001

Dr. Ilham, S.S., M.Hum
NIP. 197608272008011 011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Akin Duli, M.A
NIP. 19640716 199103 1 010

Ketua Departemen Ilmu Sejarah
Universitas Hasanuddin

Dr. Ilham, S.S., M.Hum
NIP. 197608272008011 011

**FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Pada hari Jumat, 19 Mei 2023, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

**TOKOH POLITIK SULAWESI SELATAN DI PENTAS NASIONAL
1955-1959**

Yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 19 Mei 2023



- | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|--|
| 1. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S. | Ketua | : | |
| 2. Dr. Ilham, S.S., M.Hum. | Sekretaris | : | |
| 3. Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D. | Penguji I | : | |
| 4. Dr. Muslimin AR Effendy, M.A. | Penguji II | : | |
| 5. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S. | Konsultan I | : | |
| 6. Dr. Ilham, S.S., M.Hum. | Konsultan II | : | |

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Manda Alifa Mahira Hermawan

NIM : F061191020

Departemen/Program Studi : Ilmu Sejarah/Strata 1 (S1)

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

TOKOH POLITIK SULAWESI SELATAN DI PENTAS NASIONAL 1955-1959

adalah karya ilmiah saya sendiri. Karya ilmiah ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi (Universitas Hasanuddin). Penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan kaidah penulisan akademik. Apabila di kemudian hari ternyata di dalamnya terdapat unsur-unsur plagiarisme dan tidak dapat dibuktikan dengan metode historiografi, saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 19 Mei 2023

Yang membuat Pernyataan



Manda Alifa Mahira Hermawan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu.

Hal pertama yang sejatinya kita ucapkan adalah dengan memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menentukan segala sesuatu berada ditangan-Nya. Alhamdulillah, penulis bersyukur atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah Allah SWT serta petunjuk dan pertolongan-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Penulisan skripsi ini berjudul "Tokoh Politik Sulawesi Selatan di Pentas Nasional 1955-1959" ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin. Semoga hasil penulisan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan masyarakat.

Dalam penulisan ini, penulis menghadapi berbagai hambatan dan kendala yang menghalangi proses penyelesaian. Namun, berkat Inayah dari Allah SWT dan semangat optimisme yang terus mendorong kerja keras penulis, serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya hambatan dan kendala tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk dukungan moral maupun material.

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada kedua orang tua, **(alm) Dino Hermawan** dan **Meilda Latuconsina** yang tiada hentinya memberikan doa tulus,

kasih sayang, pengorbanan, pengertian, kepercayaan, semangat dan dorongan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin sampai pada akhir tahapan ini, untuk mereka tidak ada kata-kata yang bisa penulis sampaikan, hanya ucapan terima kasih yang tak terhingga. Penulis juga sampaikan terima kasih kepada **Khosy Alvyno** yang merupakan adik penulis yang selalu memberikan semangat dan bantuannya. Tak lupa juga penulis sampaikan banyak ucapan terima kasih kepada Tante **Evi Latuconsina** dan Om **Drs. Ibrahim Bazergan, M.Si.** yang sudah berbaik hati menemani dan membimbing penulis selama masa perkuliahan di Universitas Hasanuddin Makassar serta selalu memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga penulis mendapatkan wawasan baru untuk melanjutkan penelitian ini.

Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya, terkhususnya kepada staf pengawai yang telah membantu segala jenis pengurusan berkas penulis selama berada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
3. **Dr. Ilham, S.S., M.Hum.** selaku dosen pembimbing I dan **Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S.** selaku dosen pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta dukungan selama

proses penulisan skripsi ini. Segala ilmu yang diberikan oleh keduanya sangat berharga dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis merasa beruntung memiliki bimbingan dari keduanya dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya. Serta banyak ucapkan terima kasih kepada **Kak Alief** yang telah memberikan arahan dan bantuan sekaligus penyambung lidah antara pembimbing penulis.

4. Bapak dan ibu dosen Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, **Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum., Nasihin, S.S, M.A., Dr. Nahdia Nur, M.Hum., Drs. Abd. Rasyid Rahman, M. Ag., Alm Prof. Dr. Abd. Rasyid Asba, M.A., Almarhuma Margriet Mokka Lappia, S.S., M.S., Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum., Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A., Dr. Bahar Akkase Teng, Lcp., M.Hum., Dr. Abd. Rahman Hamid, M.Si., A. Lili Evita, S.S., M.Hum., Dr. Muslimin AR Effendy, M.A.**, atas segala ilmu dan pengetahuannya yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Departemen Ilmu Sejarah. Tak lupa pula menulis berterima kasih kepada **Uddjie Usman Pati S.Sos.**, selaku Kepala Sekretariat Departemen Ilmu Sejarah.
5. **Galur Mayan Pratama**, selaku teman dekat penulis yang sudah siap siaga, sabar dan setia menemani penulis dalam keadaan apapun dari masa awal perkuliahan sampai penyelesaian tugas akhir, terima kasih sudah memberikan yang terbaik dan juga sudah sangat berjasa hingga terciptanya tulisan ini.

6. **Kak Adi Suhardi**, selaku teman diskusi penulis dengan membahas tentang perpolitikan di Indonesia dari masa awal kemerdekaan hingga saat ini dan membantu penulis untuk mendapatkan akses mencari beberapa data arsip di DPR RI.
7. **Syifa Diana** dan **Kezia Pramudia**, selaku teman curhat dan selalu menguatkan penulis ketika penulis merasa tidak mampu dalam mengerjakan tulisan ini. Kemudian **Khadafi Alfajri**, **Yoga Pangestu**, **Rafli Badogleo** dan **Adhitya Noegroho** terima kasih sudah selalu menghibur dan menemani penulis disaat penulis merasa bosan berhadapan dengan laptop.
8. **Safirra Kusumaningtyas**, **Tiur Paulinawati**, **Yusfina Maria Ulfa**, **Salsabila Aurelie** dan **Gianina Amanda**, sudah menjadi tempat cerita ternyaman sejak masa SMA dan senantiasa menghibur penulis dalam segala keadaan. Bismillah Never Say Never, maju bersama Allah.
9. **UNHASJABO**, selaku teman seperjuangan di tanah rantau yang telah menemani penulis dalam setiap cerita hidupnya dan menenangkan penulis ketika mempunyai masalah di perkuliahan.
10. **Ayu Puspa Febrianti** dan **Deadelin Sambira**, selaku teman seperjuangan penulis dari awal masa perkuliahan dan selalu mengulurkan tangan untuk membantu penulis dalam urusan surat menyurat selama penulis berada di Jakarta.
11. **AssemblyPoint** yang berisi, **Uswatun Hasanah**, **Sri Firda Ayu**, **Ferial Pithaloka**, **Suci Nurhidayah**, **Alief Syaifullah**, **Andi Rezki** dan **Andi**

Muhammad Wahyu, terima kasih sudah menjadi teman penulis sejak menginjakkan kaki pertama di Universitas Hasanuddin dan sudah menemani penulis di masa awal merantau serta mengajarkan penulis banyak hal tentang Sulawesi Selatan.

12. Teman-teman seperjuangan penulis di **Departemen Ilmu Sejarah Angkatan 2019**, yang telah bersama-sama dengan penulis dalam mengikuti pendidikan selama 4 tahun lebih di Universitas Hasanuddin. Semoga kita bisa sukses dan menjaga hubungan baik bersama.

13. **Babayoo**, yang berisi Teman KKN 108 Desa Wisata Soppeng, terima kasih sudah menjadi penghibur dan menuruti penulis yang ingin jalan-jalan di daerah Soppeng dan sekitarnya, serta sudah hadir dan menjadi memori yang indah dalam masa perkuliahan penulis.

14. Keluarga besar **HUMANIS KMFIB-UH**, yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga kepada penulis, dalam lembaga tersebut telah mengajarkan untuk menjunjung tinggi kebersamaan serta berbagai hal yang penulis tidak dapatkan dalam perkuliahan.

Penulis

Manda Alifa Mahira Hermawan

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| ABSTRAK..... | ix |
| ABSTRACT..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Batasan Masalah..... | 8 |
| 1.4 Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.5 Manfaat Penelitian..... | 9 |
| 1.6 Tinjauan Pustaka | 9 |
| 1.6.1 Penelitian Yang Relevan..... | 9 |
| 1.6.2 Landasan Teoritis..... | 12 |
| 1.7 Metode Penelitian..... | 15 |
| 1.8 Sistematika Penulisan..... | 18 |
| BAB II PERISTIWA LOKAL DAN NASIONAL 1955-1959..... | 20 |
| 2.1 Peristiwa Penting Tingkat Nasional | 21 |

| | |
|--|-----------|
| 2.1.1 Pembebasan Irian Barat | 22 |
| 2.1.2 Pergolakan Daerah..... | 26 |
| 2.1.3 Perubahan Sistem Pemerintahan Indonesia | 31 |
| 2.2 Peristiwa Penting Sulawesi Selatan..... | 36 |
| 2.2.1 Pergolakan Politik Sulawesi Selatan Pasca Kemerdekaan | 37 |
| 2.2.2 Pembentukan Kabupaten Sulawesi Selatan | 53 |
| 2.2.3 Penghapusan Tanah Swapraja | 58 |
| BAB III TOKOH POLITIK SULAWESI SELATAN DALAM DUNIA POLITIK DAN KEPARTAIAN | 63 |
| 3.1 Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)..... | 66 |
| 3.2 Partai Nahdatul Ulama (NU) | 73 |
| 3.3 Partai Kristen Indonesia (Parkindo) | 75 |
| 3.4 Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) | 77 |
| 3.5 Partai Nasional Indonesia (PNI) | 79 |
| 3.6 Partai Komunis Indonesia (PKI)..... | 80 |
| BAB IV REPRESENTASI TOKOH POLITIK SULAWESI SELATAN..... | 63 |
| 4.1 Tokoh Politik Sulawesi Selatan di Ranah Nasional | 85 |
| 4.1.1 Abdul Rasyid Faqih | 86 |
| 4.1.2 Ahmad Dara Sjahruddin | 91 |
| 4.1.3 H. Moehammad Akib | 95 |

| | |
|--|------------|
| 4.1.4 H. Andi Sewang Daeng Munthu..... | 101 |
| 4.1.5 Muhammad Noor..... | 105 |
| 4.1.6 Hussein Saleh Assegaf..... | 106 |
| 4.1.7 K.H. Muhammad Saifuddin..... | 107 |
| 4.1.8 Huibert Senduk | 108 |
| 4.1.9 Harsono Tjokroaminoto..... | 116 |
| 4.1.10 Manai Sophiaan | 117 |
| 4.1.11 Salawati Daud..... | 119 |
| BAB V PENUTUP..... | 120 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 120 |
| DAFTAR PUSTAKA | 124 |
| LAMPIRAN..... | 131 |

ABSTRAK

Manda Alifa Mahira Hermawan (F061191020), dengan judul “Tokoh Politik Sulawesi Selatan di Pentas Nasional 1955-1959”, dibimbing oleh Dr. Ilham, S.S., M.Hum dan Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S.

Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana dinamika pergerakan Tokoh Politik Sulawesi Selatan dalam dunia politik dan kepartaian serta representasi mereka selama menjabat sebagai Anggota DPR RI pada masa pemilu pertama tahun 1955. Pada Pemilu pertama di Sulawesi Selatan, peran partai politik lebih signifikan dalam mempengaruhi hasil pemilihan dan juga dalam mempengaruhi arah politik daerah ini. Hal ini mengantarkan 5 partai dari Daerah Pemilihan XII Sulawesi Selatan seperti Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi), Nahdatul Ulama, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Nasional Indonesia (PNI) menjadi perwakilan yang terjun di pemerintahan parlemen pusat. Dengan mengutuskan 10 Tokoh Politik Sulawesi Selatan yaitu, Abdul Rasyid Faqih (Masyumi), Ahmad Dara Sjahruddin (Masyumi), H. Muhammad Akieb (Masyumi), H. Andi Sewang Daeng Munthu (Masyumi), Muhammad Noor (Masyumi), Hussein Saleh Assegaf (NU), K. H. Muhammad Saifuddin (NU), Huibert Senduk (Parkindo), Harsono Tjokroaminoto (PSII) dan Manai Sophiaan (PNI). Perwakilan tokoh Sulawesi Selatan juga terdapat di Daerah Pemilihan Jakarta Raya yang diduduki oleh Salawati Daud dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dalam masa jabatannya, Indonesia kerap menghadapi masalah dalam berbagai bidang, baik dalam masalah ekonomi, budaya, sosial, sistem politik maupun pemerintahan Konflik yang terjadi merugikan masyarakat dan bahkan memicu terjadinya peristiwa penting antara tahun 1955 hingga 1959. Beberapa peristiwa penting tersebut melibatkan peranan dari pemerintah pusat yang melakukan rundingan kepada para anggota DPR RI.

Kata Kunci: Sulawesi Selatan, Tokoh Politik, Parlemen, Representasi.

ABSTRACT

Manda Alifa Mahira Hermawan (F061191020), with the title "Political Figures of South Sulawesi on the National Period of 1955-1959", Supervised by Dr. Ilham, S.S., M.Hum and Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S..

This study describes how the dynamics of the movement of political figures in South Sulawesi in the world of politics and parties and their tenure as Members of the Indonesian Parliament during during the first election in 1955. In the first election in South Sulawesi, the role of political parties was more significant in influencing the election results and also in influencing the political direction of the region. This led to 5 parties from the XII Electoral District of South Sulawesi, such as the Indonesian Muslim Syuro Council (Masyumi), Nahdatul Ulama (NU), the Indonesian Christian Party (Parkindo), the Indonesian Islamic Syarikat Party (PSII) and the Indonesian National Party (PNI) to become representatives in government. central parliament. By sending 10 political figures from South Sulawesi, namely Abdul Rasyid Faqih (Masyumi), Ahmad Dara Sjahrudin (Masyumi), H. Muhammad Akieb (Masyumi), H. Andi Sewang Daeng Munthu (Masyumi), Muhammad Noor (Masyumi), Hussein Saleh Assegaf (NU), K. H. Muhammad Saifuddin (NU), Huibert Senduk (Parkindo), Harsono Tjokroaminoto (PSII) and Manai Sophiaan (PNI). Representatives of South Sulawesi figures were also present in the Greater Jakarta Electoral District which was occupied by Salawati Daud from the Indonesian Communist Party (PKI).

During his term of office, Indonesia often faced problems in various fields, both in terms of economic, cultural, social, political systems and governance. The conflicts that occurred harmed the community even triggered important events between 1955 and 1959. Some of these important events involved the role of the government center which conducts negotiations with the members of the Indonesian Parliament.

Keywords: South Sulawesi, Political Figures, Parliament, Representation.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah memproklamasikan kemerdekaan, bangsa Indonesia kini memasuki babak baru dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut membuat Indonesia kerap menghadapi masalah dalam berbagai bidang, baik dalam masalah ekonomi, budaya, sosial, sistem politik maupun pemerintahan. Masalah ini disebabkan oleh tatanan pemerintahan yang belum cukup kuat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dalam masa pembangunannya, peranan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan pemegang tahta kekuasaan tertinggi dalam pembentukan suatu negara.¹

Rencana bangsa Indonesia dalam memperbaiki tatanan sistem pemerintahannya yang dilakukan secara progressif, dengan rencana awal membentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) demi mewujudkan sebuah negara yang demokratis. Pembentukan DPR dan MPR tentunya harus mempunyai persiapan yang cukup matang karena akan melibatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk ikutserta dalam memilih anggota-anggota perwakilan daerahnya masing-masing di Pemilihan Umum.

¹ Pidato kenegaraan Presiden Soekarno pada peringatan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1964. Dalam Buku Ir. Soekarno. *Di Bawah Bendera Revolusi*, (Jakarta: Narasi: 1960), hlm. 377.

Pada awalnya Pemilihan Umum akan dilaksanakan setelah 1 tahun masa kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1946. Namun rencana ini belum dapat terlaksana karena ketidakstabilan politik dan ekonomi negara dalam melakukan Pemilihan Umum serentak di Indonesia.² Maka untuk semakin mendukung kelancaran proses terwujudnya Pemilihan Umum, ditetapkan pula sistem Demokrasi Liberal pada tahun 1950.

Sistem pemerintahan yang diterapkan pada masa Soekarno ini menganut sistem parlementer yang diharapkan dapat menjadi pedoman utama dalam melaksanakan sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem politik yang digunakan pada Demokrasi Liberal yaitu mendorong lahirnya partai-partai dan menjadikan Negara Indonesia mempunyai sistem multi partai.³ Sistem multi partai ini semakin menunjukkan peranan partai politik pada masa itu dikenal sebagai pilar demokrasi karena mempunyai peranan yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan dan masyarakat Indonesia.⁴ Selain menjadi pilar bagi negara, partai politik juga memiliki kedudukan inti dan istimewa dalam setiap sistem demokrasi.

Kehidupan partai politik dengan menggunakan sistem tersebut menciptakan kemajuan dalam rencana bangsa untuk mewujudkan keterlibatan masyarakat sebagai pemegang peran penting dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan

² Herbert Feilth, *Pemilihan Umum 1955*, (Jakarta: Pustaka LP3S: 1988), hlm. 42.

³ Merle Calvin Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta: 2005), hlm. 479.

⁴ Sebastian Salang, *Kenali Sejarah Caleg*, (Jakarta: Perspektif Baru: 2013), hlm. 3.

Negara Indonesia.⁵ Peranan masyarakat yang disalurkan melalui partai politik membuat beberapa perwakilan dari masyarakat Indonesia bisa turut serta menyampaikan aspirasi kebijakan untuk diadvokasi menjadi materi serta saran untuk memperbaiki situasi sistem pemerintahan yang masih kacau pasca kemerdekaan.

Sepanjang diterapkannya Demokrasi Liberal, telah terjadi tujuh kali pergantian masa kabinet yang memerintah dalam kurun waktu sembilan tahun. Pada tahun 1950-1955, Indonesia sudah menghadapi empat kali pergantian kabinetyaitu kabinet Natsir, kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, dan kabinet Ali Sastroamidjojo I.⁶

Sejak awal pembentukan kabinet, pemerintah telah memfokuskan para pemimpin kabinet untuk turut membantu melaksanakan Pemilihan Umum sampai berhasil melakukan pemilihan anggota Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD. Program kerja yang selama ini dilaksanakan pada setiap kabinet yang memimpin akhirnya mencapai keberhasilan pada Kabinet Burhanudin Harap. Kabinet ini berhasil melaksanakan Pemilihan Umum Pertama di Indonesia setelah 10 tahun merdeka yaitu pada 29 September 1955.⁷

⁵ Miriam Budiardjo, "Pengantar Ilmu Politik", dalam Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 59.

⁶ Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Nutosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, (Jakarta: Balai Pustaka: 1993), hlm. 213.

⁷ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, (Bandung: Penerbit Grafiti: 1987), hlm. 216.

Pemilu pertama ini diadakan secara bertahap sebanyak dua kali untuk menentukan anggota DPR dan MPR berdasarkan suara langsung dari masyarakat. Peristiwa ini juga dilaksanakan atas dasar Undang-Undang No. 7 tahun 1953 yang menyatakan bahwa anggota DPR dan MPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.⁸

Sistem yang digunakan pada saat Pemilu 1955 adalah sistem perwakilan proposional. Sistem tersebut secara merata menghitung jumlah penduduk suatu daerah agar sesuai dengan perwakilan tokoh yang akan menjadi anggota parlemen dan konstituante di sistem pemerintahan pusat. Jatah kursi sudah diatur oleh panitia pelaksana pemilu pertama, untuk distribusi setiap daerah pada parlemen mendapatkan tiga kursi serta konstituante enam kursi. Hasil dari pemilihan umum terdapat 260 kursi anggota parlemen dan 520 kursi anggota konstituante yang dipercaya oleh masyarakat untuk mewakili daerahnya masing-masing di pemerintahan pusat.⁹

Melalui sistem proposional yang diterapkan, terdapat beberapa perwakilan tokoh dari daerah Sulawesi Selatan yang ikut masuk dalam kursi anggota parlemen pusat. Beberapa tokoh politik Sulawesi Selatan dipercaya oleh masyarakat untuk mewakili daerah Sulawesi Selatan dalam menyalurkan pemikiran dan aspirasi masyarakat dalam keberhasilan membentuk Negara Kesatuan Indonesia.

⁸ Undang-Undang Dasar No 7 Tahun 1953 lahir pada masa kabinet Wilopo menjadi payung hukum dalam pelaksanaan Pemilu 1955. UUD ini mengatur tentang persebaran daerah pemilihan yang berpengaruh untuk mendapatkan mayoritas suara di parlemen

⁹ Diatur dalam Undang-Undang Dasar No 7 Tahun 1953 Pasal 32 dan Pasal 23.

Perolehan hasil suara di daerah pemilihan umum Sulawesi Selatan membuat tokoh-tokoh politik berhasil sampai di parlemen pusat. Beberapa tokoh tersebut terbagi dalam beberapa partai utama seperti Masyumi, Nahdatul Ulama, Parkindo, PSII dan PNI dalam pemilihan umum daerah pemilihan Sulawesi Selatan.¹⁰

Partai Masyumi mendapatkan suara terbanyak di daerah Sulawesi Selatan. Dengan perolehan hasil suara 39.98% Masyumi menjadi partai dengan urutan pertama di daerah Sulawesi Selatan.¹¹ Perwakilan dari Sulawesi Selatan yang masuk melalui Masyumi berhasil mendapatkan lima kursi di anggota parlemen pusat.¹² Tokoh-tokoh tersebut adalah Abdul Rasyid Faqih, Ahmad Dara Sjahruddin, H. Moehammad Akib, H. Andi Sewang Daeng Muntu dan Mohammad Noor.

Setelah Masyumi, terdapat Nahdatul Ulama (NU) partai ini menjadi peringkat kedua perolehan suara di Sulawesi Selatan. NU mendapatkan perolehan suara sebanyak 14,26% dalam pemilu perwakilan Sulawesi Selatan dan mendapatkan dua kursi anggota di parlemen pusat.¹³ Tokoh yang mewakili NU Sulawesi Selatan ialah Hussein Saleh Assegaf dan K. H. Muhammad Saifuddin.¹⁴

¹⁰ “Penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Sulawesi Selatan”, *Arsip Pemilihan Umum Tahun 1955*, (Jakarta: Arsip Nasional RI: 2015), No. Reg 1076.

¹¹ Burhaman Djunedding, “Pesta Demokrasi di Daerah Bergolak: Politik Tingkat Lokal dan Pemilihan Umum 1955 di Sulawesi Selatan”, Dalam Dias Pradadimara, M. Bahar Akkase Teng, Heri Kusuma Tarupay, *Negara Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an* (Yogyakarta: PT. Kansius: 2014), hlm. 157.

¹² *Indonesia Raya*, tahun 1957 No. 9, hlm. 2.

¹³ Burhaman Djunedding, *Op.cit.*

¹⁴ “Daftar Nama Anggota Fraksi NU DPR”, *Arsip Nahdatul Ulama 1948-1979*, (Jakarta: ANRI: 2015), No. Reg 2471.

Partai pada peringkat ketiga berada pada Partai Parkindo dengan hasil perolehan suara sebanyak 10,64% di daerah pemilihan Sulawesi Selatan.¹⁵ Partai ini berhasil mendapatkan satu kursi dari perwakilan Parkindo Sulawesi di anggota parlemen pusat. Perwakilan dari Parkindo ialah Huibert Senduk.

Urutan suara terbanyak keempat, berada di Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). PSII berhasil mendapatkan 10,28% suara dari pemilihan umum pertama daerah Sulawesi Selatan.¹⁶ Partai yang berideologi Islam ini mendapatkan satu kursi anggota dari perwakilan daerah pemilihan Sulawesi Selatan di parlemen pusat.

Terakhir ada partai dengan urutan suara kelima, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan sistem birokratisnya. Partai yang dianggap sebagai partai terbesar kedua setelah Masyumi ini mendapatkan 4,15% suara dari wilayah Sulawesi Selatan.¹⁷ Meski mendapat angka yang terbilang cukup kecil ini tidak menghalangi PNI untuk maju dalam mewakili tokoh Sulawesi Selatan di kursi anggota DPR RI. Partai ini mendapatkan satu kursi di parlemen pusat, dengan Manai Sophiaan sebagai perwakilan dari PNI Sulawesi Selatan.

Selain melakukan penerapan sistem proposional, terdapat pula tokoh politik yang berasal dari Sulawesi Selatan namun menjadi anggota parlemen dari perwakilan daerah pemilihan wilayah Jakarta Raya.¹⁸ Tokoh tersebut adalah

¹⁵ Burhaman Djunedding, *Op.cit.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Sitti Maryam, "Salawati Daud: Dari Penerbitan Surat Kabar Hingga ke Parlemen", Dalam Dias Pradadimara, M. Bahar Akkase Teng, Heri Kusuma Tarupay, *Op.cit.*, hlm. 189.

Salawati Daud, yang mendapatkan suara dari Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI memperoleh hasil pemilihan suara sebesar 16,36% dan mendapatkan 39 kursi di parlemen pusat.¹⁹

Perwakilan tokoh tersebut membawa identitas dirinya dibawah tangan partai politik. Menggunakan representasi politik, mereka menjadi perwakilan suatu pihak atas pihak lain. Hal ini dapat dilihat melalui karakter kebijakan publik dalam kerangka berpikir dan ideologis tokoh saat melakukan praktik kekuasaan secara langsung untuk melihat fungsi politik itu sendiri.²⁰

Dalam penulisan ini akan menggambarkan kontribusi para tokoh politik di parlemen pusat terutama dalam lingkup perwakilan tokoh Sulawesi Selatan pada masa awal kemerdekaan (1955-1959). Serta melihat bentuk keaktifannya saat menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sehingga para tokoh politik tersebut dapat dikenal oleh khalayak luas. Sebagai bukti bahwa selama ini banyak tokoh politik Sulawesi Selatan memiliki kontribusi yang sangat besar bagi proses perkembangan Negara Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah yang dibahas, yaitu

1. Bagaimana dinamika pergerakan tokoh politik Sulawesi Selatan dalam peranannya di dunia politik dan kepartaian?

¹⁹ Herbert Feith, *Op.cit*, hlm. 84.

²⁰ Ichlasul Amal, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya: 1996), hlm. xv.

2. Apa yang direpresentasi oleh tokoh politik Sulawesi Selatan dalam pengaruhnya di parlemen pusat?

1.3 Batasan Masalah

Dalam studi kasus ini, penulis mempunyai batasan masalah yang diambil dalam konsep penulisan sejarah secara ilmu diakronis. Diakronis dikenal dengan sebutan “memanjang dalam waktu” dapat diartikan sebagai Sejarah yang mementingkan proses suatu peristiwa tertentu dengan jangkauan tempat dan tahun yang ditetapkan.²¹ Dengan hal itu, penulis mempunyai rentan waktu dan tempat yang di mulai dari tahun 1955 dikarenakan pada tahun tersebut sistem pemerintahan pusat di Ibu Kota DKI Jakarta seperti DPR RI baru mulai berproses dan terlihat sering terjadi permasalahan dalam sistem pemerintahannya. Hal ini membuat keterlibatan politik dari Sulawesi Selatan yang berhasil masuk ke dalam sistem pemerintahan pusat di Ibu Kota menjadi sorotan dalam penulisan ini. Tulisan ini berfokus kepada lembaga kenegaraan parlemen yaitu DPR RI, dikarenakan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan badan konstituante yaitu MPR RI dalam melaksanakan tugasnya. Penulis membatasi waktu sampai tahun 1959 karena pada tahun tersebut berakhir masa pemerintahan pertama yang sudah berjalan selama 4 tahun.

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan proses awal mula keterlibatan tokoh politik Sulawesi Selatan dalam partai dan parlemen di Pemerintahan Pusat

²¹ Wahyu Iriana, *Historiografi Barat*, (Bandung: Humaniora: 2014), hlm. 221.

- b. Menjelaskan tujuan keterlibatan tokoh politik Sulawesi Selatan dalam masa jabatannya sebagai anggota parlemen di Pemerintah Pusat.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan mengenai peranan tokoh politik Sulawesi Selatan dalam bidang sosial budaya dan politik.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembaca khususnya Mahasiswa Departemen Sejarah sebagai salah satu sumber untuk membuat karya ilmiah selanjutnya dalam kajian historis mengenai sejarah peranan tokoh politik Sulawesi Selatan.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan penulisan ini ada beberapa sumber berupa literature yang digunakan untuk di telaah kajian teorinya agar menjadi sebuah landasan pemikiran. Metode ini dilakukan agar tidak menghasilkan penulisan yang kurang dipercaya atau valid.

1.6.1 Penelitian Yang Relevan

Buku Herbert Feith “Pemilihan Umum 1955 di Indonesia” ini menjelaskan mengenai situasi Indonesia pada tahun 1955 ketika menjalani proses Pemilihan Umum pertama. Dibutuhkannya keterlibatan seluruh masyarakat Indonesia untuk turut menentukan tokoh perwakilan dari partai politik.

Buku ini juga memberikan pembahasan tentang dinamika politik pada Pemilu tahun 1955 yang akhirnya membawa perubahan besar kepada fungsi partai politik. Feith mengutarakan bahwa Pemilihan Umum pertama pada tahun 1955

merupakan sebuah pilar bagi bangsa Indonesia untuk menjadikannya sebagai acuan pada pemilu berikutnya.²²

Skripsi Muhammad Sulthon Fatawi “Dinamika Politik Pada Pemilu 1955 di Kediri”. Tulisan ini fokus kepada keadaan politik Kediri menjelang pemilu 1955 dan menganalisis hasil suara pada Pemilu 1955 di Kediri. Persaingan antar partai yang sangat membutuhkan dukungan oleh para birokrat yang mempunyai pandangan nasionalis. Terdapat empat partai dengan suara tertinggi yang mempunyai peran penting dalam membentuk struktur sosial politik masyarakat yang ada di Kediri yaitu PKI, PNI, NU, dan Masyumi.²³

Tesis Idwar Anwar yang berjudul “Berebut Suara di Daerah Konflik: Strategi Partai Politik pada Pemilu 1955 di Sulawesi Selatan/Tenggara”. Dalam tulisannya, Idwar Anwar membahas tentang situasi Pemilu Pertama di Daerah Sulawesi Selatan. Meliput kondisi bangsa Indonesia yang pada setelah kemerdekaan hingga tahun 1955 merupakan situasi yang cukup krusial bagi suatu negara untuk mencapai kestabilan pada sistem pemerintahannya.

Hingga dalam rancangan pemerintahannya tercapai Pemilihan Umum Pertama di Indonesia pada tahun 1955, yang merupakan keberhasilan pada kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu 1955 dengan tujuan membentuk DPR dan MPR diperlukan perwakilan dari masing-masing daerah di Indonesia. Tesis ini mempunyai fokus penelitian kepada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan/Tenggara,

²² Herbert Feilth, *Pemilihan Umum 1955*, (Jakarta: Pustaka LP3S: 1988).

²³ Muhammad Sulthon Fatawi, “Dinamika Politik Pada Pemilu 1955 di Kediri”. (Skripsi S1 pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, 2013).

sehingga membuat Idwar Anwar membahas mengenai pemberontakan yang terjadi dalam masa Pemilihan Umum Pertama di Sulawesi Selatan/Tenggara.²⁴

Tulisan Burhaman Djunedding “Pesta Demokrasi di Daerah Bergolak: Politik Tingkat Lokal dan Pemilihan Umum 1955 di Sulawesi Selatan” Dalam buku dari editor Dias Pradadimara, M. Bahar Akkase Teng, dan Heri Kusuma Tarupay “Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an” menjelaskan tentang gambaran dari politik lokal Sulawesi Selatan pada tahun 1950-an. Dalam buku ini juga menjelaskan mengenai Pemilihan Umum Pertama Indonesia daerah pemilihan Sulawesi Selatan. Dengan penjelasan mengenai partai politik yang turut berperan dalam pemilu tersebut hingga hasil pemungutan suara untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan pada tahun 1955.²⁵

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penelitian dalam proposal ini memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yakni terkait Pemilihan Umum di Indonesia pada tahun 1955. Akan tetapi dalam penelitian yang penulis teliti lebih memfokuskan terhadap dinamika pergerakan tokoh politik Sulawesi Selatan dan representasi tokoh politik Sulawesi Selatan di Pentas Nasional pada tahun 1955-1959. Sedangkan literature di atas mempunyai fokus penelitian yang berbeda dengan penelitian proposal ini.

²⁴ Idwar Anwar, “Berebut Suara di Daerah Konflik: Strategi Partai Politik pada Pemilu 1955 di Sulawesi Selatan/Tenggara”. (Tesis S2 pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, 2021).

²⁵ Burhaman Djunedding, “Pesta Demokrasi di Daerah Bergolak: Politik Tingkat Lokal dan Pemilihan Umum 1955 di Sulawesi Selatan” Dalam Dias Pradadimara, M. Bahar Akkase Teng, Heri Kusuma Tarupay, *Negara Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an* (Yogyakarta: PT. Kansius: 2014).

1.6.2 Landasan Teoritis

Landasan Teoritis ini bermula dari rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu Bagaimana dinamika pergerakan tokoh politik Sulawesi Selatan dalam keterlibatannya di Parlemen Pusat pasca 1955? Apa yang direpresentasikan oleh tokoh politik Sulawesi Selatan dalam pengaruhnya di Parlemen Pusat? Permasalahan ini mempunyai keterkaitan yang serupa, sehingga penelitian ini akan berfokus kepada peranan tokoh politik dalam dunia pergerakan dan kepartaian hingga mereka menjabat sebagai anggota DPR RI pada tahun 1955 dengan kekuasaan yang dibawa untuk membela atau mewakili suatu permasalahan pada bangsa.

Tujuan dari Pemilihan Umum adalah untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pembentukan DPR dan MPR tentunya harus mempunyai persiapan yang cukup matang karena akan melibatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk di Pemilihan Umum.

Pelaksanaan Pemilihan Umum dengan menggunakan sistem proposional wilayah, mengantarkan provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah yang dapat mengikuti pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam daftar pemilihan wilayah XII yang telah dibagi oleh para panitia penyelenggaraan pemilihan umum di pemerintahan pusat.²⁶ Dengan mengusung partai-partai politik untuk bertarung.

²⁶ “Kepala Bagian Politik Propinsi Sulawesi: Surat-surat tahun 1955-1956 tentang Pemilihan Umum Konstituante Asli”. *Arsip Provinsi Sulawesi Selatan 1950-1960*. (Makassar: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan). No. Reg 401.

Peranan masyarakat yang disalurkan melalui partai politik membuat beberapa perwakilan dari masyarakat Indonesia bisa turut serta menyampaikan aspirasi kebijakan untuk diadvokasi menjadi materi serta saran untuk memperbaiki situasi sistem pemerintahan yang masih kacau pasca kemerdekaan. Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan mendapatkan kursi di anggota parlemen yang berasal dari Partai Masyumi, Nahdatul Ulama, Partai Nasional Indonesia, Partai Serikat Islam Indonesia dan Partai Kristen Indonesia. Masing-masing dari partai tersebut memiliki perwakilan tokoh Sulawesi Selatan. Suara terbanyak diperoleh oleh Masyumi.²⁷

Beberapa tokoh yang mewakili partai politik di atas seperti Abdul Rasyid Faqih yang dikenal sebagai kepala pimpinan gerakan pemberontakan penerjang jajahan di Indonesia daerah Bantaeng, Ahmad Dara Sjahrudin yang merupakan Walikota Makassar pada tahun 1952, H. Moehammad Akib seorang penasehat agama Islam pada Negara Indonesia Timur (NIT), H. Andi Sewang Daeng Munthu adalah tokoh ulama sekaligus Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan pada tahun 1938 sampai 1957, Mohammad Noor yang terpilih menjadi anggota DPD Kota Makassar setelah Indonesia merdeka, Hussein Saleh Assegaf menjabat sebagai Komisaris Umum Nahdatul Ulama Provinsi Sulawesi pada 1953, K.H. Muhammad Saifuddin merupakan anggota penasehat Mahkamah Syariat Makassar tahun 1950-1955, Huibert Senduk menjabat sebagai anggota Dewan Pimpinan Daerah Sulawesi Selatan tahun 1951, Harsono Tjokroaminoto menjabat sebagai Menteri Negara

²⁷ Burhaman Djunedding, *Op.cit.*

pada kabinet Natsir tahun 1950, dan Manai Sophiaan merupakan anggota DPR RIS.²⁸

Terdapat pula tokoh Sulawesi Selatan yang berkiprah di pemerintahan pusat, yaitu Salawati Daud. Salawati Daud merupakan perwakilan dari partai PKI dengan daerah pemilihan Jakarta Raya pada masa pemilihan umum tahun 1955. Salawati merupakan wakil Walikota Makassar pada tahun 1951.

Dengan keterlibatan tokoh politik Sulawesi Selatan pada masa pergerakan kursi parlemen sudah tersusun. Konsep pemikiran mereka akan digunakan pada masa perundingan sidang di parlemen pusat. Maka dari itu penulis akan menjelaskan tentang representasi Tokoh Politik Sulawesi Selatan di Pentas Nasional.

Sebagai alat bantu konseptual, penelitian ini menggunakan teori konsep dari Miriam Budiardjo yang berpendapat bahwa tujuan politik adalah beragam aktivitas tingkat negara yang berkaitan dengan proses pendefinisian tujuan pada sistem dan pencapaiannya. Masalah politik juga berhubungan dengan tujuan masyarakat, tujuan pribadi individu serta tujuan segelintir orang. Politik berkaitan dengan tindakan banyak kelompok, seperti partai politik dan warga negara.²⁹

Harold Laswell juga mencatat bahwa inilah alasan mengapa, secara realistis, politik adalah soal siapa mendapat apa? Kenapa? Dan Bagaimana?.³⁰ Unsur-unsur

²⁸ Parlaungan, *Hasil Rakyat Memilih Tokoh-Tokoh Parlemen*, (Jakarta: CV Gita: 1956).

²⁹ Miriam Budiardjo, *Op.cit*, hlm. 160.

³⁰ Muslim Mufti, *Teori-Teori Politik*, (Bandung: CV Pustaka Setia: 2019), hlm. 8.

itu diperlakukan sebagai konsep pokok, yang dipakai untuk meneropong unsur yang lain dan dapat digunakan sebagai argumentasi penelitian yang akan dijelaskan pada tulisan ini.

1.7 Metode Penelitian

Metode yang diambil dalam penulisan mengenai “Tokoh Politik Sulawesi Selatan di Pentas Nasional 1955-1959” menggunakan metode historis. Metode historis merupakan proses dalam menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan pada masa lampau.³¹ Dalam metode historis, penulis juga menggunakan beberapa tahapan untuk dapat merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah. Seperti yang kita ketahui bahwa tahapan penulisan sejarah terdiri dari lima tahap, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi dan historiografi.³² Pada penulisan ini, tahapan tersebut digunakan sebagai pedoman penulis selama melakukan penelitian.

- a. Pemilihan topik, tahapan ini merupakan tahapan utama dalam metode penelitian. Pemilihan topik berguna sebagai batasan penelitian dalam penulisan ini. Dalam metode ini dibutuhkannya pendekatan intelektual pada topik yang diambil. Topik dalam penelitian ini adalah Tokoh Politik Sulawesi Selatan di Pentas Nasional 1955-1959.

³¹ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah* (Jakarta: Universitas Indonesia: 1975), hlm. 32.

³² Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana: 1994), hlm. 18.

b. Pengumpulan Sumber, metode ini akan membawa penulis untuk melakukan pengumpulan sumber dengan mengunjungi Arsip Nasional Indonesia (ANRI), Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Perpustakaan DPR RI, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Arsip Provinsi Sulawesi Selatan, serta Laboratorium Department Ilmu Sejarah Universitas Hasanuddin, yang menyediakan beberapa arsip terutama Arsip Hasil Rakjat Memilih Tokoh-tokoh Parlemen (Hasil Pemilihan Umum Pertama - 1955) di Republik Indonesia, buku, jurnal, surat kabar, Risalah Perundingan Sidang tahun 1955-1959 serta mengenai judul penulisan secara menyeluruh. Penggunaan sumber Arsip Hasil Rakjat Memilih Tokoh-tokoh Parlemen (Hasil Pemilihan Umum Pertama-1955) merupakan cara penulis untuk mengetahui latar belakang tokoh politik Sulawesi Selatan yang turun di Pentas Nasiona pada masa Pemilihan Umum pertama di Indonesia, dan Risalah Perundingan Sidang tahun 1955-1959 digunakan untuk melihat keterlibatan tokoh pada masa jabatannya sebagai anggota dewan di pemerintahan pusat. Namun, untuk Arsip Risalah Perundingan Sidang penulis baru mendapatkan sumber pada tahun 1956, 1957, 1958, dan hanya mendapat sebagian data pada tahun 1959. Sumber tersebut beberapa masih berbentuk fisik yang dapat ditemukan di Perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang bertempat di DKI Jakarta, serta penulis hanya mendapatkan tahun 1957 dan 1958 yang berbentuk digital. Metode ini menghadapi beberapa kendala, yaitu kurangnya data atau dokumen terkait dengan tokoh politik Sulawesi Selatan. Karena kurangnya data, penulis mencoba melengkapi informasi dari berbagai sumber

agar penelitian mengenai tokoh politik Sulawesi Selatan di pentas nasional tetap berjalan sesuai keinginan penulis. Kendala tersebut membuat penulis terus mengulik informasi mengenai tokoh politik Sulawesi Selatan dari berbagai sumber. Dalam suatu penelitian, metode obeservasi juga menjadi pembantu utama dalam mengumpulkan keterangan mengenai penelitian yang ditulis. Pengumpulan data ini terus dilakukan sampai akhirnya penulis mendapatkan informasi yang cukup lengkap dan jelas untuk melanjutkan penelitian mengenai tokoh politik Sulawesi Selatan yang terjun ke parlemen pusat pada pemilihan umum pertama di Indonesia. Dan penulis mencoba memadukan bahan dari sumber-sumber yang telah didapat selama penelitian untuk digabung menjadi suatu tulisan sejarah.

- c. Kritik sumber, metode ini diterapkan sebagai penguji tingkat otentitas dan kredibilitas suatu sumber sejarah agar tidak menimbulkan kesalahan selama penelitian mengenai sejarah. Kritik sumber juga dilakukan terhadap sumber tertulis maupun sumber lisan. Oleh karena itu metode ini termasuk kedalam kunci utama dalam penelitian penulis melakukan pengumpulan data. Dari beberapa data yang didapat, penulis harus menyatukan data tersebut agar mencapai suatu kebenaran informasi dalam sejarah yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Kritik sumber juga dibagi menjadi dua, yaitu Kritik eksternal dan Kritik Internal. Kritik eksternal diartikan sebagai usaha pemeriksaan kembali untuk mengetahui keasliaan sumber dalam segi fisik,

bahan, dan lain-lain.³³ Sedangkan kritik internal diartikan sebagai usaha untuk mengetahui bahwa dokumen yang didapatkan dapat dipercaya atau tidak.

- d. Interpretasi, metode ini dilakukan menggunakan cara menafsir untuk memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari bahan-bahan agar penulis dapat mengurutkan kisah sejarah. Setiap bahan-bahan yang diperoleh penulis baik dari sumber primer dan sumber lisan perlu dibandingkan kembali. Langkah ini perlu dilakukan karena bahan-bahan penelitian tersebut masih terhambur, maka dibutuhkan analisa mendalam dengan menggunakan berbagai pendekatan sehingga penulis mencapai kisah yang bermakna, bersifat logis dan tidak menyebabkan penyimpangan dalam penulisan.
- e. Penulisan Sejarah, metode tahap akhir dalam penulisan ini selalu berpedoman dengan keempat metode penulisan diatas. Hal ini membuat metode ini sebagai metode penutup dalam rangkaian penulisan. Dapat diartikan bahwa dalam penulisan ini diperlukan imajinasi historis yang baik, sehingga bahan-bahan penelitian sejarah yang yang valid dapat menjadi sebuah kisah yang utuh.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal penelitian yang berjudul “Tokoh Politik Sulawesi Selatan di Pentas Nasional 1955-1959” ini terbagi ke dalam lima bab yang dibuat secara sistematis sebagai berikut:

³³ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak: 2012), hlm. 134.

Bab 1, berisi tentang latar belakang penelitian, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab 2, akan menjelaskan mengenai gambaran umum peristiwa penting di ranah Nasional dan Sulawesi Selatan pada tahun 1955-1959.

Bab 3, akan membahas mengenai peran tokoh politik Sulawesi Selatan dalam dunia politik dan kepartaian.

Bab 4, penulis akan membahas apa yang di representasikan tokoh politik Sulawesi Selatan dalam keterlibatannya di Parlemen Pusat.

Bab 5, merupakan kesimpulan dari rumusan permasalahan yang telah diajukan sekaligus penutup dari penelitian yang sudah terangkum di bab terakhir ini.

BAB II

PERISTIWA LOKAL DAN NASIONAL 1955-1959

Setelah berhasil melaksanakan Pemilihan Umum tahun 1955, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam banyak aspek, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Secara politik, Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis dan partisipatif. Partai-partai politik memainkan peran yang lebih besar dalam proses politik dan pembentukan pemerintahan.³⁴ Ini memungkinkan rakyat Indonesia untuk memiliki suara yang lebih banyak dalam pengambilan keputusan politik dan mengurangi kekuasaan dari pemerintah pusat.

Namun, situasi politik di Indonesia setelah tahun 1955 juga diwarnai oleh konflik dan persaingan antar anggota DPR RI dengan pemerintah pusat yang sengit. Persaingan ini sering kali mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia. Selain itu, terdapat juga konflik antara pemerintah pusat dan daerah-daerah yang ingin memperoleh otonomi yang lebih besar.

Di sisi ekonomi, Indonesia berusaha untuk meningkatkan perekonomian negara melalui program pembangunan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan investasi dalam industri dan pertanian serta melakukan reformasi agraria yang bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan rakyat. Meskipun demikian, program-program ini belum sepenuhnya berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

³⁴ Herbert Feilth, *Pemilihan Umum 1955*, (Jakarta: Pustaka LP3S: 1988), hlm. 42.

Dalam hal sosial, Indonesia juga berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Program-program ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia dan membantu memperkuat sumber daya manusia di negara tersebut. Namun, terdapat juga tantangan dalam mengimplementasikan program-program ini, seperti kesulitan dalam memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan kesulitan dalam menghadapi masalah kesehatan dan gizi.

Secara keseluruhan, setelah tahun 1955, Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dalam segala aspek. Negara ini menjadi lebih demokratis dan partisipatif, tetapi juga diwarnai oleh konflik dan persaingan antarpartai politik yang sengit. Indonesia berusaha untuk meningkatkan perekonomiannya melalui program pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya.

2.1 Peristiwa Penting Tingkat Nasional

Secara ideologis, Indonesia memiliki landasan hukum yang mempunyai kekuatan bagi terbangunnya suatu demokrasi politik. Sebagai rujukan nilai, ideologi Pancasila merupakan landasan yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan sekian ragam ideologi yang mendunia.

Pada tahun 1955, Indonesia masih dalam proses pembangunan negara pasca kemerdekaan. Tahun ini merupakan tahun yang penting dalam sejarah Indonesia karena di tahun ini terjadi beberapa peristiwa penting. Salah satu dampak dari lemahnya sistem demokrasi adalah terbentuknya ruang kebebasan yang terlalu besar, sehingga penyampaian aspirasi dan kepentingan tidak terbatas. Meskipun setiap orang memiliki hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi dan

kepentingannya, tanpa adanya aturan yang jelas, hal ini dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Aspirasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan keributan, keinginan yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan kekacauan, dan kepentingan yang tidak terbatas dapat memicu konflik.

Hal ini terlihat pada aktualisasi kepentingan elite politik dan aspirasi masyarakat yang tidak terkendali. Politik menjadi sarana untuk memuaskan hasrat dalam meraih kekuasaan, bahkan dengan cara-cara yang tidak etis. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang jelas dan tegas untuk mengatur penyampaian aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dengan aturan yang jelas, dapat membatasi ambisi kekuasaan dan mempromosikan persaingan yang sehat dan adil.

2.1.1 Pembebasan Irian Barat

Pembebasan Irian Barat terkait erat dengan politik Indonesia, namun keberhasilannya dalam menyelesaikan persengketaan atas wilayah tersebut ditentukan oleh upaya diplomasi yang didukung oleh kekuatan militer. Pada tanggal 15 November 1946, Belanda mencoba merebut wilayah Irian Barat melalui Perjanjian Linggarjati. Dalam perjanjian tersebut, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang terdiri dari Jawa, Sumatra, dan Madura secara de facto. Berdasarkan perjanjian tersebut, Belanda kemudian membentuk Negara Indonesia Timur pada Desember 1946 hingga awal 1947

Meskipun Irian Barat sudah menjadi bagian dari Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi berdasarkan Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 penyerahan Irian Barat masih ditangguhkan. Akan tetapi KMB tidak berhasil menyelesaikan salah satu masalah yaitu penyerahan

kekuasaan oleh Kerajaan Belanda atas Irian Barat. Setelah setahun, Irian Barat masih tetap dikuasai oleh Belanda.³⁵

Usaha Indonesia dalam memperoleh dukungan Internasional dalam rangka memperjuangkan pembebasan Irian Barat, ditempuh melalui jalan lain lewat forum Konferensi Asia Afrika (KAA) dilaksanakan di Bandung tahun 1955. Pemerintah Indonesia memasukkan permasalahan Irian Barat sebagai perjuangan dari sisa-sisa kolonialisme dan imperialisme dunia, yang menjadi isu utama saat itu. Hasilnya, Indonesia mendapat dukungan dan spirit dari negara-negara peserta KAA yang kelak membuka jalan bagi Indonesia untuk memperjuangkan masalah Irian Barat di forum Internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).³⁶

Pada tahun 1955, di bawah pemerintahan kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mencoba kembali memperjuangkan kembalinya Irian Barat melalui Sidang Umum PBB ke-X, namun hasilnya tidak memuaskan karena PBB hanya memberikan arahan agar perundingan Indonesia-Belanda yang akan diselenggarakan di Jenewa dapat berhasil. Pada level perjuangan diplomasi ini, Belanda dengan sengaja menggunakan siasat yang sama, menyatakan kesediaannya untuk berunding dengan Indonesia namun dengan syarat-syarat yang berat dan kurang jelas, termasuk dalam syarat-syarat yang diajukan bahwa pembicaraan tentang beberapa masalah mengenai Irian Barat hanya mempertanyakan kebiasaan

³⁵ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, (Jakarta: Balai Pustaka: 1993), hlm. 331.

³⁶ Karseno, "Dinamika Politik Indonesia dalam Perjuangan Diplomasi Pembebasan Irian Barat, 1949-1963". *Jurnal Sejarah CITRA LEKHA*, Volume XV, Nomor 1, Februari 2011, hlm. 62.

masing-masing pihak dalam hal kedaulatan. Demikian juga ketika Indonesia mengajukan hal yang sama dalam Sidang Umum PBB ke-11 dan ke-12, gagal. Akhirnya, pada 15 Februari 1956, pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas dengan membubarkan hubungan Uni dengan Belanda.

Setelah satu tahun berlalu dan Irian Barat masih dikuasai oleh Kerajaan Belanda, pemerintah Indonesia mulai membawa masalah Irian ke sidang Majelis Umum PBB sejak tahun 1954. Namun, upaya bilateral yang dilakukan tidak membuahkan hasil yang positif. Meskipun persoalan Irian Barat berulang kali dibahas dalam sidang Majelis Umum PBB, namun tidak pernah ada keputusan yang menguntungkan Indonesia.

Pada sidang Majelis Umum PBB tahun 1957, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan dalam pidatonya bahwa jika sidang ke-XII tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai resolusi Irian Barat, maka Indonesia akan mencari cara lain selain perang untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan Belanda.

Negosiasi terkait masalah Irian Barat dimulai dengan pertemuan rahasia di kota Middelburg dekat Washington, melibatkan delegasi Indonesia dan Belanda, serta disaksikan oleh pihak ketiga yaitu Amerika Serikat. Tim delegasi Indonesia yang dikirim terdiri dari Mr. Sudjarwo Tjondronegoro dan Adam Malik, Duta Besar Republik Indonesia di Moskow, serta Mr. Zairin Zain dan Sukarjo Wirjopranoto. Mereka bertemu dengan delegasi Belanda yang terdiri dari Dr. Van Royen dan Schuurman.³⁷ Delegasi Indonesia diberi tugas oleh Presiden Soekarno untuk

³⁷ Subandrio, *Meluruskan Sejarah Perjuangan Irian Barat* (Jakarta: Yayasan Kepada Bangsa, 2001), hlm. 49.

menanyakan kepada Belanda apakah perundingan ini merupakan persiapan untuk melakukan perundingan resmi tentang cara menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia.³⁸ Pada tanggal 20 Maret 1962, perundingan rahasia dimulai di kota Middleburg dengan Bunker sebagai moderator. Pada hari pertama perundingan tersebut, dicapai dua kesepakatan antara delegasi Indonesia dan Belanda, yaitu adanya pemerintahan sementara di Irian Barat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di sana. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai asas dan pemerintahan sementara. Indonesia menganggap pemerintahan sementara sebagai bentuk peralihan dari pemerintah Belanda ke Indonesia, sedangkan Belanda tidak setuju menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia karena hal tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia di Irian Barat.³⁹

Pemerintahan sementara di Irian Barat akan dilaksanakan sampai rakyatnya dapat menentukan masa depannya sendiri. Apabila rakyat Irian Barat sepakat untuk bergabung dengan Indonesia, Belanda tidak akan memiliki masalah dengan hal tersebut. Sudjarwo menyatakan bahwa seharusnya Belanda telah menyerahkan kedaulatan Irian Barat ke Indonesia sejak tahun 1949. Selain itu, hak asasi rakyat Irian Barat akan menjadi topik pembicaraan selanjutnya, dan Indonesia menjamin bahwa hak tersebut akan ditegakkan.⁴⁰

³⁸ Rosihan Anwar, *Soekarno, Tentara, PKI* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 130.

³⁹ Subandrio, *Op.cit*, hlm. 55.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 56.

2.1.2 Pergolakan Daerah

Setelah perang mempertahankan kemerdekaan berakhir, pada tahun 1950 Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Namun, sistem ini ternyata tidak berhasil dalam pelaksanaannya dan malah menimbulkan masalah baru dalam politik Indonesia. Sistem Kabinet Parlementer dan persaingan antar partai politik menyebabkan pemerintahan Indonesia menjadi tidak stabil.

Kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap daerah menyebabkan ketidakpuasan di kalangan rakyat daerah dan berujung pada keinginan untuk memberontak. Hal itu disebabkan, daerah merasa pemerintah pusat kurang memperhatikan daerah, sehingga menimbulkan kekecewaan yang mendalam sehingga berujung pada keinginan untuk memberontak lepas dari pemerintah. Di Sumatera Barat, masyarakat merasa pemerintah terlalu memihak orang Jawa dan meremehkan penduduk asli, sehingga menimbulkan kekecewaan dan perasaan tidak senang terhadap pemerintah pusat yang dianggap sebagai "dalang" dari semua itu. Dalam situasi ini, perjuangan melawan pusat yang dipimpin oleh tokoh-tokoh Sumatra mendapat dukungan dari masyarakat pada umumnya.⁴¹

Penolakan daerah-daerah atas pemerintah pusat, tentunya karena merasa tidak puas dengan keadaan ekonomi yang belum membaik. Selain itu, politik yang tidak stabil, dengan adanya persaingan antar partai dan sentimen terhadap ras

⁴¹ Chandra. R, *Kontestasi Politik di Palembang 1950-1970: Dinamika Politik Islam dari Liberal Sampai Transisi Menuju Orde Baru*. (Yogyakarta: IDEA Press: 2015), hlm. 72.

tertentu, semakin memperburuk stabilitas bangsa yang baru merdeka dan baru lepas dari perjuangan mempertahankan kemerdekaannya. Kabinet-kabinet seringkali terbentuk dan jatuh dengan cepat.⁴²

Kekecewaan yang terus dirasakan oleh daerah-daerah mendorong mereka untuk membentuk organisasi Dewan-Dewan Daerah di Sumatra, seperti Dewan Garuda, Dewan Banteng, dan Dewan Gajah. Organisasi-organisasi tersebut kemudian menjadi bagian integral dari gerakan perlawanan di daerah, terutama di Sumatra. Salah satu tindakan mereka adalah menciptakan "Piagam Palembang" yang meminta desentralisasi dan melarang komunisme. Sayangnya, tuntutan tersebut tidak diakomodir oleh pemerintah pusat, sehingga mereka memutuskan untuk mengambil alih sumber daya ekonomi yang terdapat di daerah mereka, yang selama ini dikendalikan oleh pusat. Selain itu, para tokoh-tokoh tersebut juga membina hubungan yang semakin erat dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Singapura, Tokyo, Taiwan, dan Hongkong.⁴³

Untuk menanggapi perlawanan Sumatra, pemerintah pusat melakukan tindakan tegas dengan melancarkan serangan militer yang besar. Mereka juga menangkap para pemimpin pemberontak baik dari kalangan militer maupun sipil.⁴⁴ Operasi-operasi militer seperti Operasi Sadar (Sumsel), Operasi Tegas (Riau), dan

⁴² Irawan, *Perkembangan Demokrasi Di Indonesia*. (Jakarta: Perspekti: 2006), hlm. 54.

⁴³ R. Z. Leirissa, *PRRI Permesta, Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti: 1997), hlm. 72.

⁴⁴ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta: 2005), hlm. 397.

Operasi 17 Agustus (Padang) dilakukan dengan maksud merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh PRRI di Sumatra. Semua pasukan terlibat dalam operasi tersebut.

Meskipun terjadi pemberontakan di Sumatra Barat, Tengah, dan Riau, Sumsel memilih untuk tidak ikut campur. Alasannya adalah karena terdapat perbedaan pandangan dalam cara melihat perjuangan. Letkol Barlian, sebagai pemimpin Dewan Garuda, menolak penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan masalah antara pusat dan daerah. Sebagai akibat dari sikap ini, ia memutuskan untuk mundur dari konflik tersebut dan tidak terlibat dalam pertempuran. Pendekatan ini didukung oleh Badan Koordinasi Organisasi-Organisasi Perantau Sumatra Tengah (BKOPST), yang meminta Panglima TT II/Sriwiaya untuk bertindak sebagai penengah dan meredakan konfrontasi antara gerakan PRRI dan pemerintah pusat.⁴⁵

Atas dasar itulah, maka Letkol Barlian mengambil langkah dengan membuat rencana guna mempertemukan Kepala Staf AD (KSAD) A.H. Nasution dan panglima-panglima daerah di Pulau Bangka pada Desember 1957 sampai Januari 1958, namun usaha itu gagal. Langkah lain adalah menjadi inisiator pertemuan di Sungai Dareh yang menghasilkan ultimatum, sekaligus menjadi saksi makin melebarnya perbedaan pola perjuangan antara Letkol Barlian dan tokoh-tokoh PRRI.

⁴⁵ *Suara Rakyat Sumatera*, 17 Februari 1958.

Pada periode 1958-1959, Nawawi, M. Qorik, dan Zakaria Kamidjan fokus pada memperkuat kemampuan tempur gerakan PRRI dengan merekrut sukarelawan dari masyarakat sipil dan memberikan pelatihan militer selama satu tahun di akhir tahun 1959.⁴⁶ Setelah terlatih, pasukan tersebut ditempatkan di sektor-sektor tempur di berbagai daerah dan melaksanakan operasi militer seperti patroli, menyerang asrama militer, dan markas tentara pemerintah. Taktik perang gerilya dipilih untuk menyergap dan lari masuk ke hutan, menguasai hutan di wilayah MUBA dan Bengkulu. Strategi ini membuat Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) kesulitan.

Orang-orang baru tersebut umumnya berasal dari masyarakat sipil, maka diadakan pelatihan militer sekitar satu tahun di akhir tahun 1959. Setelah merekrut banyak sukarelawan dari masyarakat sipil, Nawawi, M. Qorik, dan Zakaria Kamidjan menyelenggarakan pelatihan militer selama satu tahun pada akhir tahun 1959. Pasukan yang sudah terlatih kemudian dipersiapkan untuk bertugas di berbagai daerah dalam sektor tempur. Mereka melaksanakan operasi militer dengan melakukan patroli, menyerang asrama militer dan markas tentara pemerintah pusat dengan strategi perang gerilya. Strategi ini melibatkan penyergapan dan kabur ke dalam hutan, menguasai hutan-hutan di MUBA dan Bengkulu. Pola tersebut sangat sulit diatasi oleh Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI).

Setelah mendapat pelatihan militer, pasukan PRRI yang terlatih dipersiapkan untuk bertugas di berbagai sektor tempur di daerah-daerah. Mereka

⁴⁶ R. Z. Leirissa, *Op.cit*, hlm. 55.

melakukan operasi militer seperti patroli, menyerang asrama dan markas militer pemerintah pusat. Strategi yang digunakan adalah perang gerilya, di mana mereka menyerang tiba-tiba dan cepat melarikan diri ke dalam hutan untuk menguasai wilayah di MUBA dan Bengkulu. Pola perang gerilya ini sangat menyulitkan APRI.

Tahun 1961 merupakan periode ketika perlawanan PRRI mengalami kemunduran, baik di wilayah pusat maupun Sumatera Barat. Hal ini disebabkan oleh berbagai permasalahan internal dan eksternal yang dihadapi oleh kelompok tersebut. Di dalam tubuh PRRI pusat, terjadi perbedaan pandangan yang tajam terkait rencana pendirian konstitusi Republik Persatuan Indonesia (RPI). Kelompok

militer mulai bergerak sendiri tanpa memperhatikan kelompok sipil PRRI. Sementara itu, PRRI Sumatera Barat juga menghadapi masalah yang tidak kalah beratnya, yaitu upaya kudeta yang dilancarkan oleh Zakaria terhadap Nawawi. Kondisi semakin kacau, sehingga Nawawi harus mundur ke MUBA dan ini menurunkan moril anggota PRRI Sumatera Barat.⁴⁷

Di sisi lain, pasukan pemerintah pusat semakin meningkatkan agresivitas operasi militer untuk menumpas pemberontakan PRRI. Hasilnya, APRI berhasil merebut markas pusat PRRI di Kota Tinggi dan merampas semua persenjataan beserta peralatan komunikasi yang ada di sana. Faktor terpenting yang melemahkan semangat perjuangan pasukan PRRI adalah tawaran perdamaian dari pemerintah, sehingga PRRI kehilangan sekitar 75 persen dari seluruh anggota pasukannya

⁴⁷ *Ibid.*

2.1.3 Perubahan Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem Parlemerter yang mulai diberlakukan dua bulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan diperkuat dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1949-1950, ternyata kurang cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia.⁴⁸ Namun, sistem tersebut ternyata tidak cocok dengan karakteristik bangsa Indonesia. Keharmonisan yang dibangun selama perjuangan melawan penjajahan melemah dan tidak dapat diwujudkan menjadi kekuatan konstruktif setelah kemerdekaan tercapai. Penyebabnya adalah karena lemahnya fondasi demokrasi parlementer, sehingga partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat mendominasi.⁴⁹

Sistem parlementer yang diberlakukan di Indonesia melalui UUDS 1950 memiliki dua kelemahan utama. Kelemahan pertama adalah terjadinya fragmentasi di dalam parlemen Indonesia, di mana tidak ada partai mayoritas yang memiliki lebih dari setengah jumlah kursi DPR. Hal ini mengakibatkan proses pembentukan koalisi yang mudah pecah karena adanya perbedaan dalam kebijakan yang diambil. Keadaan ini terjadi baik pada masa revolusi kemerdekaan maupun pada masa DPR sementara pada tahun 1950. Baru setelah terbentuknya DPR hasil pemilihan umum tahun 1955, terbentuklah koalisi besar yang terdiri dari PNI, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama.

⁴⁸ Rusadi Kartaprawira, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, (Bandung: Sinar Baru: 1977), hlm. 193.

⁴⁹ Miriam Budiardjo, "Pengantar Ilmu Politik", dalam Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 69-70

Sebagai akibat dari penerimaan Demokrasi Parleментар dengan sistem multi partai, maka dalam kurun waktu 14 tahun (1945-1959) tercatat tujuh kali terjadi pergantian kabinet, ini berarti umur rata-rata kabinet hanyalah berkisar lebih kurang 15 bulan saja, akan tetapi ada kabinet-kabinet tertentu yang mampu bertahan lebih dari 2 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik yang berkuasa ketika itu mampu menjatuhkan pemerintahan yang sedang berjalan.

Demokrasi Parleментар dinilai tidak mampu mewujudkan keadilan bagi rakyat yang telah menderita. Oleh karena itu, perlu dilakukan koreksi dengan cara mengevaluasi sistem politik yang ada. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem demokrasi yang mengarah pada pengabdian kepada negara dan bangsa serta dihuni oleh orang-orang yang jujur.

Situasi politik pada masa itu sangat kacau, di hampir setiap daerah terjadi pemberontakan akibat ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat. Konflik kekuasaan antara partai politik di parlemen yang saling menjatuhkan satu sama lain menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpuasan di kalangan Angkatan Darat. Pada tanggal 17 Oktober 1952 Angkatan Darat dengan mengarahkan meriamnya ke arah Istana Negara.⁵⁰ Pimpinan AD saat itu Kolonel A.H. Nasution dalam aksinya tersebut mendesak Soekarno untuk membubarkan parlemen dan mengambil alih kekuasaan, tetapi Soekarno menolaknya karena Soekarno tidaksuka untuk didesak-desak.

Soekarno mengungkapkan bahwa pengalaman selama 11 tahun dengan sistem demokrasi liberal atau parlementer menunjukkan bahwa demokrasi tidak

⁵⁰ M.C. Ricklefs, *Op.cit.* hlm. 487.

cocok dengan kepribadian Indonesia. Demokrasi tersebut adalah demokrasi yang diimpor dari Barat dan tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, sehingga menyebabkan masalah dalam pelaksanaannya. Dalam demokrasi parlementer, terdapat konsep oposisi yang memperparah kondisi karena diartikan sebagai penentangan yang hebat terhadap pemerintah.

Kabinet yang sesuai dengan kepribadian Indonesia adalah kabinet gotong royong yang akan terdiri dari semua unsur-unsur golongan yang ada dalam masyarakat. Soekarno juga menyatakan bahwa pemaksaan mayoritas atas minoritas tidak sesuai dengan cara Indonesia, dimana dalam pengambilan keputusan dengan melalui jalan musyawarah untuk mufakat. Selama ada golongan minoritas yang belum yakin akan suatu usul maka musyawarah harus diteruskan dibawa tuntunan seorang pemimpin sampai ditemukan kata sepakat, hal ini memungkinkan semua pendapat dipertimbangkan dengan memperhatikan pendapat minoritas. Inilah yang oleh Soekarno dianggap sebagai model demokrasi Indonesia.⁵¹

Cara yang harus ditempuh untuk melaksanakan koreksi tersebut adalah Mengganti sistem *free fight liberalism* dengan Demokrasi Terpimpin yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam Demokrasi Terpimpin perlu dibentuk suatu Kabinet Gotong Royong⁵² yang anggotanya terdiri dari semua partai

⁵¹ Kementerian Penerangan, *Menjelamatkan Republik Proklamasi. (Konsepsi Bung Karno). : Tjataan stenografis pidato Presiden Soekarno tanggal 21 Februari 1957 djam 20.05 di istana Merdeka*, (Jakarta: Kementerian Penerangan: 1957).

⁵² Berdasarkan Ketetapan Presiden No 4 tahun 1960 tanggal 24 Juni 1960, maka Dewan Perwakilan Rakyat dan Kabinet Gotong Royong resmi dilantik untuk

dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat, Dewan Perancang Nasional akan membuat blue print masyarakat yang adil dan makmur, Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan- golongan fungsional dalam masyarakat.

Dewan Nasional memiliki tugas utama untuk memberikan nasihat kepada kabinet, baik itu diminta atau tidak diminta. Konstituante sebaiknya tidak menjadi tempat perdebatan yang terus menerus dan segera menyelesaikan tugasnya sehingga blueprint yang dibuat oleh Depernas dapat didasarkan pada konstitusi baru yang dibuat oleh konstituante. Konstituante harus meninjau dan memutuskan masalah Demokrasi Terpimpin dan masalah kepartaian. Diperlukan penyederhanaan sistem kepartaian dengan mencabut Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang telah memberikan ruang bagi sistem multi partai, serta menggantinya dengan Undang-Undang Kepartaian dan Undang-Undang Pemilu.

Wacana tentang Demokarsi Terpimpin bukanlah sesuatu yang baru muncul ketika dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959,⁵³ akan tetapi wacana tersebut sudah terlintas dalam diri Soekarno bertahun-tahun sebelum tepatnya tahun 1957

menggantikan DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 yang dibubarkan tanggal 5 Maret 1960 dengan berdasarkan Ketetapan Presiden No. 3 tahun 1960. Dengan alasan, DPR hasil pemilu 1955 berselisih pendapat dengan pemerintah mengenai Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 1961.

⁵³ Dekrit Presiden 5 Juli adalah suatu pernyataan yang diucapkan Presiden Soekarno di depan Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi: 1. Pembubaran konstituante (lembaga pembuat undang-undang dasar). 2. Berlakunya kembali UUD 1945. 3. Membentuk MPRS dan DPAS dalam jangka waktu tidak lama lagi. Lihat: Cheppy Hari Cahyono & Suparlan Alhakim, , *Ensiklopedi Politika*, (Surabaya: Usaha Nasional:1982), hlm. 88

diterapkannya Demokrasi Terpimpin tersebut. Bagi Soekarno, Demokrasi Parleментар yang dipakai bangsa Indonesia merupakan produk impor yang tidak sesuai dengan keadaan sosial masyarakat kita dan demokrasi tersebut tidak menjiwai cita-cita bangsa Indonesia.

Berkaitan dengan persoalan di atas maka hampir dari seluruh pidato yang disampaikan Soekarno, kebanyakan berisikan sekaligus menjelaskan tujuan tentang Demokrasi Terpimpin. Tetapi dalam hal ini yang perlu disorot adalah asas/dasar yang melahirkan Demokrasi Terpimpin itu sendiri. Akibatnya terjadi pembubaran DPR dan MPR hasil pemilu 1955, digantikan dengan MPR Sementara dan DPR Gotong Royong yang anggotanya diangkat oleh Presiden Soekarno.

Presiden Soekarno juga mengangkat pimpinan MPR Sementara dan DPR Gotong Royong sebagai menteri koordinator dan menteri dalam kabinet. Upaya untuk menyederhanakan sistem partai politik juga dilakukan dengan mengurangi jumlah partai politik melalui Peraturan Presiden No. 7/1959. Maklumat pemerintah tentang pembentukan partai politik tanggal 3 November 1945 dibatalkan, dan partai politik baru harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan agar diakui oleh pemerintah. Hanya 10 partai politik yang memenuhi persyaratan tersebut, termasuk PKI, PNI, NU, Partai Katolik, Partindo, Parkindo, Partai Murba, PSII Arudji, IPKI, dan Partai Islam Perti. Sementara itu, partai politik lain tidak memenuhi persyaratan, termasuk PSI dan Masyumi yang dituduh terlibat dalam pemberontakan PRRI/PERMESTA.⁵⁴

⁵⁴ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan partai politik*, (Jakarta: YOI: 1998), hlm. 72.

2.2 Peristiwa Penting Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki sejarah yang panjang dan penuh dengan peristiwa penting. Pada periode tahun 1955-1959, Sulawesi Selatan menjadi saksi dari beberapa peristiwa penting yang terjadi baik di tingkat nasional maupun lokal. Periode ini dianggap sebagai masa transisi yang penting bagi sejarah Indonesia, di mana bangsa Indonesia sedang mencoba untuk membangun negara yang merdeka dan berdaulat setelah terlepas dari penjajah.

Konflik di Sulawesi Selatan pada tahun merupakan hasil dari beberapa faktor. Salah satunya adalah ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap daerah tersebut. Sejak masa kolonial, Sulawesi Selatan seringkali dianggap sebagai daerah yang kurang berkembang dan terbelakang dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah pusat masih menghadapi berbagai tantangan dalam membangun negara yang baru, dan hal ini menyebabkan Sulawesi Selatan menjadi daerah yang kurang mendapat perhatian.

Selain faktor politik, konflik di Sulawesi Selatan juga dipicu oleh adanya masalah sosial dan ekonomi. Masyarakat di daerah tersebut seringkali mengalami kemiskinan dan kurangnya akses terhadap pembangunan infrastruktur. Hal ini menyebabkan ketimpangan ekonomi yang cukup signifikan di kehidupan penduduk Sulawesi Selatan. Selain itu, konflik antar kelompok juga terjadi karena adanya perbedaan suku, agama, dan budaya di daerah tersebut. Di antara kelompok-

kelompok tersebut adalah kelompok yang mendukung pemerintah pusat, kelompok yang ingin memisahkan Sulawesi Selatan dari Indonesia, dan kelompok yang menginginkan otonomi daerah yang lebih besar. Perbedaan pandangan ini mengakibatkan konflik politik yang seringkali berujung pada tindakan kekerasan.

Dalam kondisi seperti ini, Sulawesi Selatan menjadi daerah yang tidak stabil pada masa itu. Konflik yang terjadi merugikan masyarakat setempat, dan bahkan memicu terjadinya peristiwa penting antara tahun 1955 hingga 1959. Beberapa peristiwa penting tersebut melibatkan peranan dari pemerintah pusat yang melakukan rundingan kepada para anggota DPR RI dan berbagai tokoh penting di Sulawesi Selatan, seperti penetapan UU pembentukan kabupaten di Sulawesi Selatan, peristiwa Kahar Muzakkar, Permesta, penghapusan swapraja, dan lain sebagainya.

2.2.1 Pergolakan Politik Sulawesi Selatan Pasca Kemerdekaan

Konflik antar kelompok politik di Sulawesi Selatan dapat digambarkan dengan peristiwa pemberontakan Kahar Muzakkar tahun 1950-1965, yang merupakan pemberontakan paling lama pada masa pemerintahan Soekarno. Munculnya peristiwa pemberontakan ini disebabkan Kahar Muzakkar merasa kecewa terhadap perilaku Kawilarang yang menolak usulannya bahwa laskar griliya dapat menjadi pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) tanpa melalui seleksi ketat, unsur budaya yaitu *siri*⁵⁵ dan *pesse* nilai yang dipegang teguh

⁵⁵ Dianggap bagian dari *siri* karena Kahar Muzakkar bersama pendukungnya merasa harga dirinya diinjak-injak oleh pemerintah karena merasa tidak dihargai perjuangannya. Sementara *pacce/pesse* karena merasa pedih dan seberperasaan dengan teman-teman seperjuangannya menanggung malu. Artinya Kahar Muzakkar sangat malu sama teman seperjuangannya karena tidak mampu

dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar, dan faktor agama Islam yang dianut rakyat di Sulawesi Selatan.⁵⁶

Pada tahun 1950, Kahar dikirim oleh Markas Besar APRI ke Sulawesi Selatan untuk menyelesaikan permasalahan Kesatuan Geriliya Sulawesi Selatan (KGSS). KGSS secara resmi meminta penggabungan ke dalam Angkatan Republik Indonesia Sulawesi (APRIS) sebagai Divisi Hasanuddin di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kahar Muzakkar.

Kahar kemudian menemui Kolonel Kawilarang yang menjabat sebagai panglima TT VII/Wirabuana untuk melakukan perundingan. Namun, permintaan ini ditolak Kawilarang dan mengeluarkan Dekrit Pembubaran pada 1 Juli 1950 mengatakan bahwa KGSS dan organisasi geriliya lainnya diluar APRIS dianggap telah bubar.⁵⁷ Ketegangan meningkat ketika Kahar Muzakkar mencopot pangkatnya dihadapan Kawilarang dan sejak saat itu Kahar tidak pernah kembali lagi kedalam lingkungan APRI.

Memedulikan pernyataan Kawilarang yang seperti tidak menghargai KGSS, membuat siri dan pessi memainkan peran utama peran dalam mendorong Kahar ke arah pemberontakan dan alasan utama mengapa mantan "patriot menjadi pemberontak." Pemberontakan Kahar sebenarnya terus mengacu pada ideologi

menjadikannya sebagai tentara reguler dalam satu Brigade Hasanuddin. Lebih lanjut lihat Anhar Gonggong, *Abdul Qahhar Muzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak: 2004), hlm. 34.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 96.

pancasila sampai pada tahun 1952 yang disebut Trisila atau Tiga Pilar yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, keadilan sosial dan kemanusiaan.⁵⁸

Pemberontakan ini mendapat dukungan dari berbagai golongan masyarakat, seperti elite bangsawan, ulama, pedagang, guru, dan petani. Dukungan ini disebabkan Mereka membantu masyarakat dalam berbagai hal, seperti memperbaiki jalan, membangun jembatan, dan memberikan pengobatan gratis. Penerapan sistem Hukum Islam oleh Kahar Muzakkar, dengan kebijakan seperti penghapusan ketidakadilan sosial, kepemilikan tanah (Landreform), penghapusan paham feodalisme, serta pelarangan terhadap gelar kebangsawanan.⁵⁹

Kahar Muzakkar mengumumkan bergabung pada Darul Islam pada 7 Agustus 1953 dibawah pimpinan Kartosuwirjo di Jawa Barat serta mengubah daerah Sulawesi Selatan diubah menjadi Negara Islam Indonesia (NII).⁶⁰ Namun, beberapa pasukan yang dipimpin oleh Kahar menolak masuk dalam keanggotaan Darul Islam dan memutuskan untuk berpisah dari Kahar. Seperti, Usman Balo yang pernah memimpin kelompok batalyon Latimojong, menolak untuk mengikutinya ke dalam Darul Islam. Menyusul perpecahan ini, mantan pejuang dan komandan nasionalis lainnya yang berpisah Kahar saat ini karena yang menolak Darul Islam adalah Andi Sose dan Andi Selle.

⁵⁸ Abdul Qahhar Mudzakkar, *Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia: Koreksi Pemikiran Politik Pemerintahan Soekarno*, (Jakarta: Madinah Press. 1999), hlm. 107-108.

⁵⁹ Christian Pelras, *Manusia Bugis*, (Jakarta: NALAR, 2006), hlm. 336.

⁶⁰ “Berkas Kegiatan Gerombolan DI/TII Kahar Muzakkar Di Sulawesi Selatan Dan Tenggara”, *Arsip Pribadi Muhammad Saleh Lahade 1937-1973*, (Makassar: DPKSS), No. Reg 191.

Langkah yang ditempuh oleh Abdul Kahar Muzakkar juga menjadi awal terjadinya konflik antar elite politik lokal Sulawesi Selatan. Andi Selle dan Andi Sose, yang sebelumnya terlibat dalam gerakan pemberontakan di bawah pimpinan Kahar Muzakkar, memutuskan untuk bergabung dengan pasukan militer pemerintah Republik Indonesia.⁶¹ Keputusan pemerintah pusat untuk melantik Andi Selle dan Andi Sose sebagai anggota APRI tidak disetujui oleh Kahar.

Pemerintah Pusat mulai menyusun strategi untuk meredakan ketegangan dengan Kahar sebagai pemimpin pemberontak. Pemerintah menggunakan cara perundingan damai dan operasi militer. Strategi ini mendapat dukungan dari kaum politisi Islam dibawah pimpinan Muhammad Natsir dan Partai Masyumi, serta didukung juga oleh pimpinan Angkatan Perang atau Angkatan Darat.⁶²

Strategi pertama yang digunakan adalah melakukan perundingan damai dengan mengirim perwakilan khusus yang terdiri dari pejabat tinggi pemerintah dan tokoh-tokoh agama untuk membicarakan solusi damai.⁶³ Kemudian Kahar melakukan negosiasi dengan perwakilan pemerintah mengenai tuntutan mereka yang terus berlanjut agar ditempatkan ke dalam APRI sebagai Divisi Hasanuddin khusus dan Kahar sebagai panglima.

⁶¹ Anhar Gonggong, *Op.cit*, hlm. 292-293.

⁶² *Ibid.*

⁶³ “KSAP kepada Presiden RI : surat tanggal 29 Agustus 1951 tentang usul agar PM dan Menteri Penerangan mengadakan desakan secara pribadi kepada pemimpin-pemimpin di Makassar untuk menghadapkan Kahar Muzakkar kepada pemerintah”, *Arsip Kabinet Presiden RI 1950-1959*, (Jakarta: ANRI: 1995). No. Reg 1762.

Kahar meminta agar diresmikan sebagai anggota APRI dalam satu brigade bernama Brigade Hasanuddin. Namun, tuntutananya tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat, yang menyebabkan Abdul Kahar Muzakkar semakin marah. Kahar meningkatkan kekuatan pasukannya dan memulai perlawanan terhadap pemerintah RI. Perbedaan pandangan menyebabkan Kahar memilih berada dipihak gerilyawan dan menekan tuntutan mereka yang ditolak. Kemudian Kahar bersama pasukannya masuk ke dalam hutan dan memulai pemberontakan terhadap pemerintah pusat Indonesia.⁶⁴

Dengan menggunakan strategi gerilya sekitar 30 Batalyon DI/TII merambah ketiga wilayah, yaitu Sulawesi Selatan, Tengah dan Tenggara. Kahar Muzakkar memanfaatkan radio untuk berkomunikasi dengan pasukannya dan memberikan instruksi. Mereka menggunakan kode-kode rahasia untuk menghindari pendeteksian oleh TNI. yang dilakukan Kahar Muzakkar dan pasukannya tidak selalu berjalan lancar. Mereka sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan logistik dan pengiriman persediaan makanan dan perlengkapan lainnya. Selain itu, pasukan TNI juga melakukan berbagai upaya untuk mencari dan menangkap Kahar Muzakkar dan pasukannya, termasuk melibatkan pasukan lintas udara dan pasukan tempur yang dilengkapi dengan peralatan modern.

Sulawesi Selatan di masa kepemimpinan Kahar Muzakar cukup berhasil menerapkan keputusan politiknya untuk ikut campur secara aktif dalam pemilihan umum tahun 1955. Lima tentara dan petugas TPS mereka tewas pada 29 September.

⁶⁴ Bahar Mattalioe, *Pemberontakan Meniti Jalur Kanan*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia: 1994), hlm. 51.

Insiden ini terjadi di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, saat pasukan TNI mencoba untuk menghentikan konvoi truk yang membawa para pemilih dari daerah terpencil.

Konvoi truk tersebut diduga membawa pendukung Partai Masyumi, salah satu partai politik Islam yang kuat pada waktu itu. Pasukan TNI memerintahkan pengemudi truk untuk berhenti dan diperiksa, tetapi para penumpang menolak dan menyerang pasukan TNI dengan senjata tradisional. Lima anggota TNI tewas dalam insiden tersebut. Kejadian ini adalah salah satu dari beberapa insiden kekerasan yang terjadi selama Pemilihan Umum pertama di Indonesia, yang memicu kekhawatiran atas stabilitas politik di negara baru ini. Insiden ini juga menggarisbawahi ketegangan antara partai politik yang berbeda di Sulawesi Selatan, di mana persaingan politik sering kali memicu kekerasan dan konflik.⁶⁵

Gerombolan itu menculik beberapa orang lainnya dan membakar beberapa tempat pemungutan suara. Pemberontakan tersebut terjadi di tengah-tengah konflik politik yang sengit antara partai-partai politik di Sulawesi Selatan. Surat suara dan kotak suara dicuri di Kabupaten Makassar, Pare-Pare, dan Donggala. Ketakutan masyarakat akan berita tentang penculikan dan pembunuhan menjadi alasan utama. Hanya beberapa wilayah di Kabupaten Makassar, Bantaeng, Luwu, Bone, dan Mandar yang diizinkan menyelenggarakan Pemilihan Umum.

⁶⁵ “Kepala Bagian Politik Propinsi Sulawesi: Surat-surat tahun 1955-1956 tentang Pemilihan Umum Konstituante Asli”. *Arsip Provinsi Sulawesi Selatan 1950-1960*. (Makassar: DPKSS). No. Reg 401.

Kerasnya pendirian Kahar Muzakkar membuat pemerintah RI mengakhiri perundingan damai dan menempuh cara kedua, yakni operasi militer. Operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui dua periode, yaitu periode Tentara Teritorial (TT) VII/Wirabuana (1951-1957) dan periode Komandan Daerah Militer (KODAM) XIV/Hasanuddin (1957-1965), bertujuan untuk memadamkan pemberontakan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan.

Pada periode pertama, operasi dipimpin langsung oleh Panglima TT VII/Wirabuana, yaitu Kolonel Kawilarang. Pasukan operasi militer yang disebut "Operasi Merdeka" dibentuk untuk memburu pasukan Abdul Kahar Muzakkar. Operasi ini melibatkan pasukan dari TNI, Polri, dan masyarakat setempat yang mendukung pemerintah. Strategi yang sama dilakukan oleh pelanjut Kolonel Kawilarang, yaitu Gatot Subroto, yang membentuk Operasi Halilintar pada periode kedua.⁶⁶

Operasi Halilintar mengalami kemajuan dengan dilakukannya operasi pemberantasan pemberontakan yang lebih intensif. Hal ini terbukti dari keberhasilan pasukan dalam merebut wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pemberontak dan mengurangi dukungan masyarakat terhadap pemberontak. Meskipun operasi-operasi tersebut berhasil menumpas pemberontakan Kahar

⁶⁶ Operasi Halilintar merupakan salah satu operasi "pembersihan" oleh TNI dalam melawan pasukan Corps Tjadangan Nasional pimpinan Kahar Muzakkar. Operasi ini dicetuskan oleh Kolonel Gatot Subroto dan menunjuk Letkol J. F. Warow sebagai komandan operasi. Lihat Anhar Gonggong, *Op.cit.*

Muzakkar, namun meninggalkan trauma dan dampak sosial yang cukup besar bagi masyarakat Sulawesi Selatan.⁶⁷

Operasi militer besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengalahkan gerakan separatis tersebut, menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Tentara Indonesia dituduh menggunakan kekerasan yang berlebihan dalam operasi militer melawan gerakan separatis Kahar Muzakkar. Beberapa saksi mata dan korban mengatakan bahwa tentara Indonesia melakukan penangkapan dan penindasan yang tidak manusiawi, termasuk penyiksaan dan eksekusi terhadap para tahanan. Hal ini menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan ketakutan di kalangan masyarakat.

Masyarakat juga melihat bahwa Operasi militer melawan gerakan separatisme Kahar Muzakkar menimbulkan banyak masalah hak asasi manusia. Banyak warga sipil yang tidak terlibat dalam gerakan separatis dipenjarakan dan disiksa oleh tentara Indonesia. Hal ini menimbulkan kekecewaan dan kemarahan di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan, serta menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.⁶⁸

Secara umum, penanganan pemerintah pusat atas pemberontakan Kahar Muzakkar adalah dengan mengambil tindakan tegas dan terukur untuk memadamkan pemberontakan, sambil tetap membuka ruang untuk dialog dan diplomasi dengan para pemimpin pemberontak. Hingga akhirnya TNI menembak

⁶⁷ Anhar Gonggong, *Ibid*, hlm. 312.

⁶⁸ *Arsip Provinsi Sulawesi Selatan 1946-1960*. (Makassar: DPKSS), No. Reg 518.

dan membunuh Kahar di Sulawesi Tenggara. Rupanya, tubuhnya diterbangkan ke Makassar untuk diidentifikasi dan kemudian dimakamkan di tempat yang tidak diketahui dan kuburan tak bertanda.⁶⁹

Keputusan pemerintah pusat untuk mencengkram beberapa daerah dengan cara menugaskan perwakilannya sendiri pada provinsi-provinsi di Indonesia merupakan suatu pemantik konflik politik yang terjadi di daerah Sulawesi Selatan. Pemerintah pusat seringkali memaksakan keinginan politiknya dan kerap mengabaikan aspirasi masyarakat. Dengan melakukan sentralisasi kekuasaan dalam mengidentifikasi setiap permasalahan dan merumuskan pemecahannya.

Bukan hanya pemberontakan Kahar Muzakkar yang ada di Sulawesi Selatan, terdapat juga Gerakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), gerakan ini diinisiasi oleh para perwira dan prajurit militer Indonesia Timur yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dan tidak menguntungkan daerah-daerah di luar Jawa, termasuk Sulawesi. Gerakan Permesta dipimpin oleh beberapa tokoh, yaitu Letnan Kolonel Ventje Sumual yang sebelumnya bergabung dengan Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Alext Evert Kawilarang yang merupakan pendiri Kesatuan Komando Tentara Teritorium III/Siliwangi dan Jacob Frederick Warouw yang merupakan seorang konseptor Gerakan PRRI dan Permesta.

⁶⁹ Mattuluda, "Kahar Muzakkar : Profil Patriot Pemberontak" dalam Taufik Abdullah, Aswab Mahasin, Daniel Dhakidae, *Manusia dalam Kemelut Sejarah* (Jakarta : Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1983), hlm. 174.

Sumual menyatakan bahwa Daerah Teritorium VII/Wirabuana Indonesia Timur merupakan bukti dari ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Seperti di Minahasa yang merupakan tempat kelahirannya merupakan salah satu sentra perdagangan kopra. Pada pertengahan tahun, Minahasa memproduksi 49.000 ton kopra dalam perdagangan antar pulau dan luar negeri.⁷⁰ Jumlah tersebut belum termasuk dengan 230.000 ton kopra yang dibarter dengan Singapura.⁷¹ Namun, pemerintah pusat kemudian mengambil alih Yayasan Kopra di Minahasa sehingga menimbulkan kerugian akibat harga jual yang dipatok lebih rendah jika dibandingkan dengan kopra dari Jawa. Hal tersebut menimbulkan gejolak masyarakat dan turut ikutserta mendukung gerakan Permesta.

Gerakan ini juga muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah pusat. Masyarakat Sulawesi mulai menyadari bahwa pengiriman anggaran belanja dari pusat ke daerah kerap terlambat dan tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan sehingga menyebabkan daerah-daerah di Sulawesi kerap terlantar. Hal ini dikarenakan, 70% dari anggaran diserap oleh pemerintah pusat dan hanya paling tinggi 30% yang dikembalikan ke daerah.⁷² Hingga, Sumual harus meminjam uang ke Bank Indonesia sebesar Rp.

⁷⁰ “Gubernur Sulawesi: Surat-surat masuk/ keluar tahun 1953-1957 tentang masalah yang berhubungan dengan Yayasan Kopra Sulawesi. *Arsip Rahasia Propinsi Sulawesi 1946-1960*. (Makassar: DPKSS). No. Reg 627.

⁷¹ Abdul Rasyid Asba, *Kopra Makassar Perebutan Pusat dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.2004), hlm. 56.

⁷² R. Z. Leirissa, *Op.cit*, hlm. 65.

100.000.000,- dan membagikannya ke setiap daerah di Indonesia Timur sebesar Rp. 2.000.000,- untuk digunakan sebagai pembiayaan daerah.⁷³

Situasi mulai mengangkan ketika Mohammad Hatta yang dianggap tokoh Luar Pulau Jawa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden pada 1 Desember 1956, karena merasa posisinya sudah tidak mempunyai kekuatan.⁷⁴ Alasan utamanya karena sistem pemerintahan tidak efektif menjalankan pembangunan akibat selalu terjadi pergantian kabinet yang hanya mencerminkan kepentingan partai. Hatta lebih memilih memperbaiki sistem kepartaian sedangkan Soekarno hanya ingin bebas dari partai-partai dan menciptakan sebuah gagasan baru yaitu demokrasi terpimpin.⁷⁵

Gerakan Permesta bermula dari ketidakpuasan beberapa tokoh terhadap pemerintahan Soekarno yang dinilai otoriter dan cenderung mengabaikan aspirasi daerah. Selain itu, adanya ketidakpuasan terhadap sentralisasi kekuasaan di Jakarta juga menjadi salah satu faktor pemicu munculnya gerakan Permesta. Kemudian, tepat tiga bulan setelah Mohammad Hatta mundur, gerakan Permesta mulai muncul di Sulawesi.

Ketidakpuasan masyarakat Sulawesi terhadap kebijakan pemerintah pusat ini akhirnya memicu terbentuknya gerakan Permesta sebagai upaya untuk menuntut hak-hak mereka dan mengoreksi kebijakan pemerintah pusat. Gerakan Permesta

⁷³ *Harian Gelora Mesa*, 15 Januari dan 4 Februari 1958.

⁷⁴ Barbara Harvey, *Permesta Pemberontakan Setengah Hati*, (Jakarta Pusat: PT.Grafiti Pers: 1984), hlm. 61-62.

⁷⁵ M.C Ricklefs, *Op.cit*, hlm. 502.

diproklamasikan pada tanggal 2 Maret 1957 pukul 3 dini hari di Lapangan Merdeka Makassar Proklamasi tersebut dihadiri oleh sekitar lima puluh orang terkemuka di Makassar, termasuk orang-orang sipil. Setelah pembacaan proklamasi, Saleh Lahade membacakan Piagam Perjuangan Semesta atau yang dikenal sebagai Permesta.⁷⁶ Istilah "semesta" dipilih untuk menunjukkan bahwa perjuangan ini melibatkan seluruh bidang dan wilayah.

Pada saat pembacaan Teks Proklamasi, Sumual mulai memberlakukan darurat perang dan di bawah kekuasaan pemerintahan militer sesuai dengan Pasal 129 UUD Sementara 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1948. Namun, perlu dicatat bahwa dalam proklamasi tersebut juga ditegaskan bahwa pihak Permesta tidak bermaksud melepaskan diri dari Republik Indonesia.

Permesta awalnya merupakan gerakan yang muncul di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang kemudian menyebar ke daerah-daerah lain di Indonesia Timur seperti Sulawesi Utara, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Gerakan ini dipelopori oleh sekelompok perwira militer yang merasa tidak puas dengan kebijakan pusat terkait dengan peran militer dalam pembangunan dan keamanan daerah-daerah di luar Jawa.

Sumual menjabat sebagai panglima tertinggi dari gerakan Permesta dan Saleh Lahade sebagai kepala staf. Mereka dibantu oleh staf pemerintah militer, staf pribadi, tim asistensi, dan Dewan Pertimbangan Pusat (DPP). Selain itu, dibentuk pula empat gubernur militer yang bertanggung jawab kepada Sumual sebagai administrator militer. Empat gubernur militer tersebut adalah Andi Pangerang

⁷⁶ Barbara Harvey, *Op.cit*, hlm. 69.

Pettarani yang bertanggung jawab atas Sulawesi Selatan dan Tenggara, Mayor D.J Somba yang bertanggung jawab atas Sulawesi Utara, Letnan Kolonel Pietersz yang bertanggung jawab atas Maluku dan Irian Barat, serta Letnan Kolonel Minggu yang bertanggung jawab atas Nusa Tenggara.⁷⁷

Semula, pusat gerakan Permesta berada di Makassar yang saat itu merupakan ibu kota Sulawesi. Namun, pada Juni 1957 pusat gerakan pindah ke markas Permesta di Desa Kinilow, Sulawesi Utara.⁷⁸ Pindahnya Sumual dari Makassar selain karna surutnya dukungan di Sulawesi Selatan, yaitu disebabkan oleh perubahan struktur militer, yaitu pemecahan Tentara Teritorium VII (TT-VII) dan Komando Pengamanan Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara (KoDPSST) menjadi empat Komando Daerah Militer (KDM), termasuk KDM-Sulawesi Selatan dan Tenggara (KDM-SST).

Langkah yang diambil oleh Ventje Sumual menimbulkan kecurigaan pemerintah pusat di Jakarta. Nasution ingin membekukan TT VII/Wirabuana dan membentuk Komando Antar Daerah Indonesia Timur (KOANDAIT) di bawah pimpinan Kolonel Gatot Soebroto. Empat komando daerah militer yang direncanakan oleh Sumual diambil alih oleh Nasution dan resmi menjadi KDM-SST di bawah Panglima Letkol Andi Matalatta, KDM Bali/Nusa Tenggara di bawah Letkol Minggu, KDM Maluku/Irian Barat di bawah Letkol H Pieters, dan KDM-Sumatera Utara (KDM-SUT) di bawah Letkol D.J. Somba. Keempat

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 71.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 61-62.

panglima daerah tersebut berada di bawah pimpinan Kolonel Gatot Soebroto sebagai Panglima KOANDAIT. Kebijakan militer ini dianggap melupakan pengorbanan dan jasa Sumual dalam pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan ketertinggalan. Hal ini menyebabkan Sumual kehilangan kekuasaannya secara drastis dan ia akhirnya memutuskan untuk pulang ke tanah leluhurnya untuk mempersiapkan langkah selanjutnya⁷⁹

Gerakan Permesta memiliki dukungan dari pihak asing, terutama Amerika Serikat yang khawatir terhadap pengaruh komunis di Indonesia. Dukungan tersebut meliputi pasokan senjata dan logistik serta pelatihan bagi anggota gerakan Permesta. Selama gerakan Permesta berlangsung, Amerika Serikat memberikan bantuan kepada kelompok separatis Permesta. Bantuan ini berupa persenjataan, logistik, dan dukungan finansial. Bantuan ini tidak langsung dilakukan oleh pemerintah AS, melainkan oleh CIA (Central Intelligence Agency) yang saat itu sedang gencar melakukan operasi rahasia di Asia Tenggara untuk menangkal pengaruh komunis. Bantuan ini diduga dilakukan untuk menjaga kepentingan Amerika Serikat di wilayah Asia Tenggara, dengan cara memperlemah pemerintah Indonesia yang saat itu dianggap cenderung ke arah komunis.

Selama gerakan Permesta berlangsung, Lapangan Udara Sam Ratulangi di Manado menjadi tempat penting bagi para pemimpin Permesta, termasuk Kolonel Ventje Sumual yang memimpin gerakan di Sulawesi Utara. Lapangan udara ini menjadi pusat operasi dan komunikasi antara pemimpin Permesta di berbagai

⁷⁹ R. Z. Leirissa, *Op.cit*, hlm. 116-122

wilayah, serta menjadi titik pendaratan pesawat yang membawa bantuan dari pihak luar. Bahkan, untuk memperkuat angkatan udara gerakan Permesta yang dinamakan Angkatan Udara Revolusioner (AUREV), Amerika Serikat mendatangkan sejumlah pesawat terbang, seperti pesawat pengangkut DC-3 Dakota, pesawat pemburu P-51 Mustang, Beachcraft, Consolidated PBY Catalina dan pembom B-26 Invader.⁸⁰

Disaat Sumual dan Warouw sedang berbincang dengan Soekarno untuk mencari jalan tengah dalam gerakan Permesta. Tuntutan itu diiringi dengan ultimatum agar pemerintah pusat segera mengabdikan dalam tempo 7x24 jam, yang dihitung sejak 15 Februari sampai 22 Februari 1958. Namun, belum sampai titik temu permasalahan di Indonesia Timur, Pemerintah Jakarta dibawah Nasution justru mengebom wilayah Manado. Bom yang dijatuhkan Angkatan Udara Republik Indonesia membuat Sumual dan para pendukung Permesta tidak terima dan melakukan penyerangan balik.

Pemerintah pusat kemudian menyiapkan operasi merdeka yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukmito Hendratimena, dengan tujuan utama untuk merebut Sulawesi Utara dan daerah sekitarnya. Dengan persiapan yang sangat matang, Sumual mempunyai rencana untuk segera menyerang ibukota Jakarta. Persiapan strategi penyerangan berpusat di Bandara Kemayoran dan Kilang Minyak Tanjung Priok. Sumual percaya jika rencana tersebut berjalan lancar, maka Pulau Jawa

⁸⁰ Ivan R.B.Kaunang, *Permesta, Manusia Dalam Perang: Riwayat Perjuangan Lengkong Worang, Kapten Permesta, Letkol (Purn) TNI AD*. (Minahasa: Graha Cendikia bekerja sama dengan Institut Kajian Budaya Minahasa: 2015), hlm. 112.

sudah dipastikan akan lumpuh. Namun, sayangnya rencana tersebut gagal karena salah satu pesawat Permesta yang dikendarai Agen CIA yaitu Allen Lawrence Pope berhasil ditembak jatuh pada 18 Mei 1959.⁸¹

Pada akhirnya Amerika Serikat memutuskan untuk menghentikan bantuan tersebut dan memilih untuk menarik diri dari konflik tersebut. Beberapa alasan seperti, Meskipun Amerika Serikat memberikan bantuan yang cukup besar kepada gerakan Permesta, pemberontak ternyata tidak mampu mengalahkan pemerintah Indonesia. Pemberontakan ini terdiri dari banyak kelompok yang tidak terkoordinasi dan kurang memiliki kemampuan militer dan logistik yang memadai. Pemberontakan ini juga terjadi di wilayah yang terpencar-pencar, sehingga sulit untuk diorganisir dengan efektif. Dalam situasi seperti ini, bantuan Amerika Serikat tidak cukup untuk memenangkan pertempuran.

Pasca peristiwa tersebut, kekuatan Permesta semakin terdesak hingga akhirnya satu persatu pemimpin gerakan seperti Alex Kawilarang dan Ventje Sumual menyerahkan diri. Sedangkan Joop Warouw tewas dalam tragedi ini. Meskipun Permesta sudah berakhir, peristiwa ini menjadi tonggak penting terkait intervensi Amerika Serikat dalam politik di Indonesia. Permesta juga menjadi bagian penting dari perjuangan pemerataan pembangunan nasional.

⁸¹ “Kementerian Luar Negeri kepada Presiden RI: laporan tanggal 21 Desember 1957”, *Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI 1950-1959*. (Jakarta: ANRI: 1995). No. Reg 586.

2.2.2 Pembentukan Kabupaten Sulawesi Selatan

Pasca kemerdekaan, pemerintah RIS menerbitkan Peraturan Pemerintah RIS No. 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi, Sulawesi turut masuk menjadi salah satu provinsi di Indonesia menjelang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Piagam Persetujuan dengan Republik Indonesia Serikat.⁸² Sulawesi menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang berada di bawah pemerintahan pusat setelah NKRI dibentuk. Dalam hal pemerintahan, kebijakan dan keputusan penting diambil oleh pemerintah pusat. Hal ini membuat pemerintahan daerah Sulawesi kurang responsif terhadap kebutuhan dan masalah yang ada di wilayah tersebut. Keterbatasan kewenangan juga membuat pemerintah daerah tidak memiliki kebebasan untuk mengambil kebijakan yang terbaik bagi masyarakat setempat.

Selain itu, masalah-masalah yang terkait dengan pembangunan seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan juga masih belum terlalu diutamakan. Beberapa wilayah di Sulawesi masih terisolir dan sulit dijangkau karena minimnya fasilitas transportasi dan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, muncul keinginan dari masyarakat dan para pemimpin daerah untuk memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam mengelola wilayah Sulawesi. Keinginan ini diwujudkan dengan memperjuangkan status sebagai daerah otonom.

Kemudian, dikeluarkan lagi Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1952, daerah Sulawesi Selatan dibubarkan dan dibentuk tujuh Daerah Swatantra yang

⁸² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi.

berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah-daerah tersebut ialah Makassar di Sungguminasa, Bonthai di Bonthain, Bone di Watampone, Pare-Pare di Pare-Pare, Mandar di Majene, Luwu di Palopo, dan Sulawesi Tenggara di Bau-Bau.⁸³

Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat di Sulawesi Tenggara menyadari bahwa kelancaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, mengalami hambatan jika Ibukota Provinsi berada di Makassar. Karena jarak dari Sulawesi Tenggara dan Makassar yang terlalu jauh, ditambah masih minimnya alat transportasi hingga hubungan kurang lancar dan bahkan terputus sama sekali.

Usaha masyarakat Sulawesi Tenggara terus berjalan sampai Republik Indonesia akan mengadakan Pemilihan Umum tahun 1955 dan memperjuangkan agar Sulawesi Tenggara menjadi satu Daerah pemilihan terpisah dari Sulawesi Selatan. Panitia Pemilihan Umum menyetujui dan terbentuklah Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan tersendiri setingkat Sulawesi Tenggara, sehingga mempunyai wakil-wakil tersendiri. Peristiwa ini menjadi perjuangan pertama terpisahnya Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara secara politis konstitusional. Pemerintah Pusat menyadari bahwa belum adanya keputusan atau undang-undang yang membicarakan mengenai penetapan Provinsi Sulawesi terbagi menjadi dua yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Persoalan pembentukan swatantra tingkat I

⁸³ Suwadji Sjafei dkk, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi sejarah Nasional: 1981), hlm. 1.

di Sulawesi tidak kembangkan lagi, karena sudah lama dan cukup rasanya rakyat Sulawesi diombang-ambingkan oleh siasat politik Pemerintah.

Akhirnya, dengan diterbitkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, menurut Undang-undang ini daerah dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu Daerah tingkat ke-I termasuk Kotrapraja Jakarta Raya, Daerah tingkat ke-II termasuk Kotrapraja dan Daerah tingkat III. Undang-undang menganut sistem Otonomi Rill yang berarti daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, disebut juga “Daerah Swatantra” dan “Daerah Istimewa”.⁸⁴

Namun, masih belum terlihat implementasi yang konkret dan sejauh mana Undang-Undang tersebut telah dijalankan sesuai dengan tujuan awal pembentukannya dan pembagian wilayah tersebut tidak memuaskan, kemudian menimbulkan tuntutan dari masyarakat di Sulawesi. Permasalahan ini termasuk salah satu tuntutan gerakan Parmesta.

Dalam menanggapi tuntutan tersebut, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain kemampuan keuangan negara pada saat itu, faktor politik, sosial-ekonomi, geografis, historis, etnologis, kebudayaan, dan faktor-faktor obyektif lainnya. Pertimbangan ini juga melihat dasar kepemilikan tanah di Sulawesi Selatan yang kemungkinan besar merupakan tanah swapraja.

Pemerintah juga harus melakukan studi kelayakan dan menyusun rencana pembentukan daerah-daerah tingkat I dan II yang efisien dan efektif. Secara faktual,

⁸⁴ Tri Ratnawati, *Pemekaran Daerah: Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2009), hlm. 73.

pembentukan otonomi daerah hanya dilakukan atas dasar permintaan masyarakat setempat yang ingin daerah mereka diakui sebagai daerah paling tinggi. Pada kenyataannya, anggaran keuangan yang seharusnya dialokasikan untuk daerah-daerah baru yang telah dibentuk tidak pernah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1957.

Dalam pelaksanaannya, beberapa daerah tingkat II di Sulawesi Selatan kemudian dibagi menjadi beberapa daerah tingkat II baru seperti pada 17 Januari 1957 melalui Undang-undang Darurat No.2 tahun 1957 mengenai pembubaran Makassar dan pembentukan Gowa, Makassar, dan Jeneponto-Takalar, Kemudian Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1957 mengenai pembubaran Luwu dan pembentukan Daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu, dan Undang-undang Darurat No.4 tahun 1957 mengenai pembubaran Daerah Bone dan pembentukan Bone, Soppeng dan Wajo.⁸⁵

Setelah mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, pemerintah akhirnya menetapkan pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi Selatan sebagai solusi yang tepat dan memadai. Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa jumlah tersebut masih dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan jaminan terselenggaranya pemerintahan yang lebih intensif dan efektif, serta masih dapat dipikul dalam batas kemampuan keuangan negara pada saat itu.⁸⁶

Dengan terbentuknya daerah tingkat I dan II diseluruh Provinsi Sulawesi, maka dengan sendirinya dapat dilaksanakan pembagian persentase pajak-pajak

⁸⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957, No. 2-4. (Jakarta: Sekretariat Jendral DPR RI: 1957).

⁸⁶ Tri Ratnawati, *Op.cit*, hlm 32.

untuk daerah tingkat I dan tingkat II sebagai yang ditetapkan dalam keterangan Pemerintah tersebut diatas untuk seluruh Sulawesi khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya. Secara keseluruhan, pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi Selatan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

Kemudian, pada tanggal 4 Juli 1959 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Setelah ditetapkannya Undang-undang ini, seluruh Undang-undang Darurat yang dibuat untuk pembagian daerah otonom II Sulawesi Selatan dicabut. Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan meliputi Pare-Pare dibagi menjadi lima daerah tingkat II, Makassar dibagi menjadi dua daerah tingkat II, dan Jeneponto-Takalar dibagi menjadi satu daerah tingkat II.

Perubahan struktur pemerintahan di daerah mencapai puncaknya ketika Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara dibentuk. Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan sebagai daerah otonom dibentuk berdasarkan Perpu 47 tahun 1960 pada tanggal 13 Desember 1960. Setelah hampir sembilan tahun tanpa adanya pemerintah daerah yang meliputi seluruh wilayah Sulawesi Selatan, akhirnya didirikan daerah otonom baru dan DPRD-nya segera dibentuk. Pada tanggal 20 April 1960, Provinsi Sulawesi Selatan resmi dibentuk dengan Letnan Kolonel A. Rivai sebagai gubernur. Dengan demikian, penataan ulang negara di tingkat provinsi dapat dianggap selesai.⁸⁷

⁸⁷ Dias Pradadimara, "Kronika Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an," dalam Dias Pradadimara, M. Bahar Akkase Teng, Heri Kusuma Tarupay. (e.d), *Negara*

2.2.3 Penghapusan Tanah Swapraja

Pada masa penjajahan Belanda dan pembentukan wilayah-wilayah, bangsawan lokal tetap memegang posisi sebagai kepala daerah yang memiliki pemerintahan sendiri. Di Indonesia pada saat masih bernama Hindia Belanda, terdapat wilayah-wilayah yang diperintah langsung oleh pemerintah Hindia Belanda dan wilayah-wilayah yang diberikan otonomi oleh *Zelfbestuurders*, yaitu daerah-daerah swapraja.⁸⁸

Wilayah-wilayah yang tidak langsung dikuasai oleh Belanda, para bangsawan diakui secara formal memiliki kedudukan yang lebih penting dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang langsung dikuasai oleh Belanda. Konsep Swapraja merujuk pada wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri dan erat kaitannya dengan jabatan raja. Kebijakan politik untuk menentukan apakah jabatan raja dapat dihapuskan atau tidak di wilayah otonom ditentukan berdasarkan kebijaksanaan politik. Jika kebijakan politik dilakukan berdasarkan kehendak rakyat, maka keputusan mengenai apakah jabatan raja akan dihapuskan atau tidak di suatu wilayah akan tergantung pada keinginan rakyat setempat.

Tanah-tanah termasuk hutan dalam wilayah swapraja merupakan tanah-tanah swapraja, yang kewenangan penguasaan dan pemberian haknya ada pada Pemerintah swapraja yang bersangkutan. Ada tanah-tanah yang dikuasai dengan hak yang bersifat perdata oleh kepala swapraja secara pribadi atau dalam

Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an (Yogyakarta: PT. Kansius: 2014), hlm. 26.

⁸⁸ Rismawidiawati. "Raja Bone XXXIII: Hubungannya dengan Belanda (1946 – 1951)", *Jurnal Walasuji*, Volume 7 Nomor 1 Juni 2016, hlm 203-204.

kedudukannya sebagai kepala keluarga kerajaan, misalnya adalah tanah untuk istana, tempat peristirahatan dan keperluan pribadi lainnya. Sisanya adalah tanah-tanah, termasuk hutan yang dikuasai dengan hak yang bersifat publik oleh pemerintah swapraja. Tanah-tanah inilah yang oleh pemerintah swapraja diberikan kepada pihak lain dengan hak-hak yang dikenal di swapraja yang bersangkutan.⁸⁹

Hukum tanah swapraja ini pada dasarnya adalah hukum tanah adat yang diciptakan oleh Pemerintah swapraja dan sebagian diciptakan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Landasan hukumnya adalah antara lain *Koninkrijk Besluit* yang 6 diundangkan dalam *Staatsblad* No. 474 Tahun 1915 yang intinya memberi wewenang pada penguasa swapraja untuk memberikan tanahnya dengan hak-hak barat serta *Rijksblad Kasultanan* No.16 Tahun 1918, *jo Rijksblad Kasultanan* No.23 Tahun 1925, serta *Rijksblad Paku Alaman* No.18 Tahun 1918, *jo Rijksblad Paku Alaman* No.25 Tahun 1925 dimana hak milik atas tanah tidak diberikan kepada warga negara Indonesia non-pribumi. Dalam konsiderans *Staatsblad* No. 474 tahun 1915 ditegaskan bahwa di atas tanah-tanah yang terletak dalam wilayah hukum swapraja, dapat diberikan hak kebendaan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), seperti hak eigendom, erfpacht, opstal, dan sebagainya. Dimungkinkan bagi pemerintah swapraja untuk memberika tanah-tanah swapraja dengan hak-hak barat, terbatas pada orang-orang yang tunduk pada BW saja.⁹⁰

⁸⁹ Bachtiar Effendie, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Bandung: 1993), hlm. 5

⁹⁰ Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Tjakrawala: 1953), hlm. 185.

Dalam perkembangan selanjutnya sebagian besar kawasan Sulawesi Selatan dikuasai oleh Belanda yang kemudian memperkenalkan dan melaksanakan sistem politik baru, yakni melaksanakan sistem birokrasi dan administrasi Barat. Namun demikian kehidupan adat setempat tidak mengalami perubahan. Itulah sebabnya pada saat revolusi pada tahun 1945, masyarakat Sulawesi Selatan tidaklah mengalami revolusi sosial. Sulawesi Selatan adalah suatu masyarakat yang seringkali digambarkan sebagai masyarakat feodal atau tradisional. Sulawesi Selatan merupakan suatu masyarakat dengan karakter bangsawan yang kuat dan juga mempunyai ketaatan yang kuat terhadap aturan hukum adat.⁹¹

Hubungan antara raja dan kelompok feodal dengan anggota masyarakat tetap normal sampai diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dampak dari adanya hubungan yang harmonis antara kelompok *principality* (kerajaan) dengan masyarakat, khususnya ketika revolusi meletus, maka masyarakat menerima kepemimpinan raja selama revolusi berlangsung. Tidak ada rasa kecurigaan rakyat kepada mereka semua berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat di daerah-daerah yang sudah banyak dipengaruhi pendidikan dan alam pikiran Barat serta pandangan hidup baru, mungkin memandang jabatan raja itu sudah tidak lagi meliputi tugas mati. Dalam keadaan demikian pendemokrasian swapraja berarti penghapusan jabatan raja yang berarti pula penghapusan swapraja itu. Apabila jabatan raja tidak dihapuskan maka swapraja itu tetap ada.

⁹¹ Barbara Harvey, *Op.cit*, hlm. 19.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) disebut tanah eks swapraja, yang sampai saat ini masih sering dipersepsikan lain antara pemerintah swapraja dan Pemerintah RI dalam rangka pemberlakuan hukum tanah nasional.⁹² Perlu ditekankan bahwa tujuan utama pengelolaan sumber daya alam/kekayaan alam berdasarkan ketentuan konstitusi UUD 1945 pasal 33 yaitu bahwa bumi,air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat Indonesia yang dapat diartikan pula untuk kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu untuk mengurai masalah pengelolaan tanah swapraja atau eks swapraja yang kompleks dan sensitif, ada baiknya jika dilengkapi juga mengenai kesejahteraan dan keadilan.

Dalam konstitusi Negara Republik Indonesia tidak ada yang memberikan pengertian secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan tanah swapraja atau bekas swapraja. Berikut juga pada UUPA tidak terdapat penjelasan secara rinci mengenai pengertian swapraja, walaupun ada kata swaparaja hanya dalam diktum IV huruf A UUPA. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dalam Diktum ke IV, masih menyebut adanya daerah swapraja dan bekas swapraja. Namun demikian, hingga kini Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur pelaksanaan dari Diktum ke IV UUPA huruf A tersebut belum juga ada. Peraturan yang ada adalah Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 yang memuat ketentuan mengenai

⁹² Ahmad Fauzi Ridwan, *Hukum Tanah Adat*, (Jakarta: Dewaruci Press: 1982), hlm. 11.

pembagian tanah swapraja dan bekas swapraja dalam rangka pelaksanaan Landreform. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan swapraja dan bekas swapraja.